



# LAPORAN KINERJA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT



**MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2022/2023**



**AMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA  
WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**27 DESEMBER  
2022**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 periode 28 Agustus s/d 27 Desember 2022 sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dewan yang bersifat tahunan yang disusun setiap periode masa persidangan DPRD Provinsi Sumatra Barat.

Laporan ini disusun memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat, program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran aktif DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan. Diharapkan apa yang telah dicapai DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 4 (empat) bulan ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Sumatera Barat.

Akhir kata Laporan ini dapat menjadi motivasi bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan menambah wawasan serta peningkatan kemampuan dalam melakukan penyusunan Laporan.

PADANG, 27 DESEMBER 2022  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA



SUPARDI

## IKHTISAR LEGISLATIF

Laporan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari Pelaksanaan Rencana Strategis DPRD Provinsi Sumatera Barat 2020-2025 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Masa Persidangan Pertama ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan rensponsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, dalam rangka peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, secara sistematis telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPRD Tahun 2020-2025, Visi DPRD adalah "Terwujudnya DPRD Provinsi Sumatera Barat yang Kredibel, Sinergis dan Modern" dengan misi yaitu:

- 1) Membangun Tata Penyelenggaraan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah. Anggaran dan pengawasan dalam kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD yang menjamin terlaksananya proses "checks and balance" berbasis aspirasi rakyat berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Memperkuat tata kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dengan membangun mekanisme dan praktis terbaik yang menjamin terlaksananya representasi rakyat diiringi fasilitasi administrasi, teknis, dan keahlian sebagai unsur penunjang yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang pelaksanaan pemerintahan maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemerintahan didaerah adalah sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya representasi rakyat melalui proses checks and balance berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan untuk menghasilkan produk-produk pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat yang aspiratif.
- 2) Mewujudkan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang kuat dengan dukungan teknis administrasi yang professional dan dukungan keahlian sebagai penunjang substansial yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai Tindak Lanjut dari tujuan yang ingin dicapai DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka diperlukan sasaran untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemerintahan. Adapun sasaran yang dimaksud adalah:

1. Terbentuknya peraturan daerah untuk menata penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
2. Mewujudkan pembahasan APBD yang berdasarkan kesepakatan bersama yang mendukung pembangunan daerah
3. Mewujudkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Kepala Daerah dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dalam rangka akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran tersebut di atas diaplikasikan oleh masing-masing alat kelengkapan Dewan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Program dan kegiatan DPRD pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 juga dalam rangka menjawab isu-isu aktual dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi pembentukan produk hukum/peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
- 2) Penguatan kelembagaan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Meningkatkan dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Barat dan
- 4) Meningkatkan dukungan substansial pada produk-produk hasil penyelenggaraan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai bahan penilaian kinerja pada DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Pertama Tahun 2022/2023.

PADANG, 27 DESEMBER 2022  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT



SUPARDI

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR LEGISLATIF	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang	1
B.Dasar.	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D.Sistematika Penulisan .	2
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM KEGIATAN-KEGIATAN DPRD</b>	4
1.Fungsi Legislasi	4
2.Fungsi Anggaran	4
3.Fungsi Pengawasan	4
4. Tugas dan Wewenang Alat Kelengkapan Dewan	5
4.1.Badan Anggaran	5
4.2.Badan Musyawarah.	5
4.3.Komisi-Komisi	5
4.4.Bampemperda	5
4.5.Badan Kehormatan	
4.6. Alat Kelengkapan Lainnya (Panitia Khusus)	
<b>BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	
A Pelaksanaaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi	7
B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	11
C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	11
D. Kegiatan Kelembagaan.	11
1.Reses ke Daerah Pemilihan	11
2.Menerima Aspirasi Masyarakat	14
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat	15
a.Rapat Paripurna	15
b.Rapat Badan Musyawarah	21
c.Rapat Konsultasi Pimpinan/Gabungan Pimpinan	21

V

4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi	21
5. Penyelenggaraan Tugas-Tugas Pimpinan	22
E. Kegiatan Alat Kelengkapan Dewan	23
1. Kegiatan Komisi-Komisi	23
2. Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	44
3. Kegiatan Badan Musyawarah	57
4. Kegiatan Badan Anggaran	58
5. Kegiatan Badan Kehormatan.	64
6. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah	65
7. Kegiatan Fraksi-Fraksi	66
<b>BAB IV : HASIL YANG DICAPAI</b>	
a. Pelaksanaan Fungsi Peraturan Daerah	82
b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran	82
c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	82
d. Keputusan Dewan	83
e. Keputusan Pimpinan	84
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
Kesimpulan	85
Saran	87

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam Pasal 162 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD melaksanakan Tugas Kedewanan dibagi dalam 3 (tiga) masa sidang yaitu, Masa Persidangan Pertama Tanggal 28 Agustus s.d 27 Desember, Masa Persidangan Ketiga Tanggal 28 Desember 2021 s.d 29 April dan Masa Persidangan Ketiga Tanggal 30 April s.d 27 Agustus.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dengan berakhirnya Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/ 2023 pada tanggal 27 Desember 2022, dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas, kedudukan dan fungsi dewan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu disusun Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dirangkum dalam Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/ 2023 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023.

### **B. DASAR**

Dasar penyusunan laporan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/ 2023 yang memuat tentang keadaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 didasari oleh :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratis Pimpinan dan Anggota DPRD
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023.
2. Untuk mengetahui gambaran dan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 yang dimulai dari tanggal 28 Agustus 2022 s.d 27 Desember 2022.
3. Untuk mengetahui berbagai kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023.
4. Dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan dewan sebagai pedoman untuk penyempurnaan dimasa mendatang.

### D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 ini disusun dan disampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

#### Bab. I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Dasar
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan

#### Bab. II Gambaran Umum Kegiatan DPRD Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023

#### Bab. III Pelaksanaan Kegiatan

- A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
- B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
- C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
- D. Kegiatan Kelembagaan DPRD
  1. Reses Ke Daerah Asal Pemilihan
  2. Menerima Aspirasi Masyarakat
  3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat
  4. Penyelengaran Tugas Administrasi
  5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan
- E. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
  1. Kegiatan Komisi-Komisi
  2. Kegiatan Badan Musyawarah
  3. Kegiatan Badan Anggaran
  4. Kegiatan Badan Kehormatan
  5. Kegiatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
  6. Kegiatan Panitia Khusus

- F. Kegiatan Fraksi-Fraksi
1. Fraksi Partai Gerinda
  2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
  3. Fraksi Partai Demokrat
  4. Fraksi Partai Golongan Karya
  5. Fraksi Partai Amanat Nasional
  6. Fraksi PPP - Nasdem
  7. Fraksi PDI-Perjuangan & PKB.

**Bab. IV Hasil Yang Dicapai**

1. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi
2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran
3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
4. Keputusan DPRD Dan Keputusan Pimpinan DPRD

**Bab. V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KEGIATAN DPRD PADA MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2022/2023**

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 yang dimulai dari tanggal 29 April 2021 sampai dengan 27 Agustus 2022, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan mulai dari rapat-rapat, peninjauan lapangan, pembahasan ranperda, kunjungan kerja, Sosialisasi Perda, peningkatan kapasitas sampai dengan pelaksanaan reses untuk menjemput aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Sumatera Barat.

Agenda kegiatan dewan lain juga telah dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai berikut :

#### **1. Fungsi Legislasi**

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, DPRD telah melakukan harmonisasi terhadap 3 ranperda, yaitu :

1. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Ranperda tentang Tata Kelola Harga Komoditi Unggulan Daerah, dan
3. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

DPRD melalui alat kelengkapannya, juga melakukan kegiatan terkait dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, diantaranya melaksanakan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan.

#### **2. Fungsi Anggaran**

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, sebagai bentuk pelaksanaan Fungsi Anggaran telah dilakukan agenda pembahasan Pertanggungjawaban APBD tahun 2021 yang telah ditetapkan pada Rapat Paripurnan tanggal 8 Juli 2022. Disamping itu DPRD juga telah melakukan dan menyelesaikan pembahasan KUA PPAS Tahun 2023 dan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022, Pembahasan dilakukan baik dikomisi-komisi bersama mitra kerja maupun pada Badan Anggaran bersama TAPD. Untuk KUA PPAS Tahun 2023 telah disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 1 Agustus 2022, sedangkan untuk pembahasan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2022 direncanakan akan di tetapkan pada tanggal 1 September 2022.

#### **3. Fungsi Pengawasan**

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pelaksanaan tindak lanjut LHP BPK.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasannya, DPRD melalui komisi-komisi dan Bapemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut, dengan melaksanakan rapat kerja dan kunjungan lapangan sesuai lingkup tugas komisi-komisi. Disamping itu Badan Anggaran DPRD melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

#### **4. Tugas Dan Wewenang**

Selain menjalankan tugas dan fungsinya DPRD, Alat Kelengkapan DPRD juga menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu :

##### **4.1. Badan Anggaran**

Badan anggaran sesuai dengan tugas dan wewenangnya melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA PPAS Tahun 2023, rancangan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022 serta pembahasan RAPBD Perubahan Tahun 2022.

##### **4.2. Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023.

##### **4.3. Komisi-Komisi**

Komisi-Komisi berdasarkan tugas dan wewenangnya melaksanakan pengawasan dan peninjauan terhadap pelaksanaan program Pemerintahan Daerah yang dibiayai dengan dana APBD maupun APBN, melaksanakan rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait, melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, serta menindaklanjuti surat yang masuk ke DPRD berdasarkan lingkup tugas masing-masing komisi.

##### **4.4. Bapemperda**

Bapemperda sesuai dengan tugas dan wewenangnya, melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah daerah dalam rangka penyusunan peraturan daerah dengan mengutamakan skala prioritas berdasarkan kebutuhan daerah serta melakukan Harmonisasi terhadap Ranperda yang masuk kedalam Propemperda Tahun 2023.

##### **4.5. Badan Kehormatan**

Badan Kehormatan melaksanakan pengawasan internal DPRD, yaitu pengawasan atas aktivitas kedewanan meliputi tingkat kehadiran anggota DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat dan juga menindaklanjuti surat masuk dari masyarakat/lembaga /organisasi masyarakat lainnya yang berkaitan dengan aktifitas dan tindakan anggota DPRD.

##### **4.6. Alat Kelengkapan lainnya (Panitia Khusus)**

Alat Kelengkapan lainnya (Pansus) dibentuk apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus dan materi pembahasannya bersifat lintas komisi yang segera memerlukan dukungan dan atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang pembahasannya melibatkan lintas komisi.

Secara keseluruhan agenda kegiatan yang dilaksanakan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 secara umum telah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Pembahasan terhadap ranperda yang masuk dalam daftar Propemperda Tahun 2022 akan dilanjutkan pembahasannya pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023.

### **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi**

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah, Konsultasi dan Study Banding Bapemperda serta Harmonisasi terhadap pembahasan Ranperda yang masuk dalam Daftar Propemperda Tahun 2022.

##### **I. Rapat Kerja Bapemperda.**

###### **A. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja**

Hasil Rapat Kerja :

Masing-masing Alat Kelengkapan Dewan telah mengusulkan Ranperda yang akan dimasukkan kedalam Propemperda Tahun 2023 yakni :

Usulan dari Komisi II :

1. Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemitraan Perkebunan Sawit.
3. Ranperda tentang Perhutanan Sosial.
4. Ranperda tentang Perlindungan Budidaya Perikanan Air Tawar.

Usulan dari Komisi I :

1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Daerah.
2. Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Perda Nagari).

Usulan Fraksi Gerindra :

1. Ranperda tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat.
- Selanjutnya usulan-usulan dari Alat Kelengkapan Dewan ini akan dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah, yang akan diprioritaskan untuk dimasukkan kedalam Propemperda Tahun 2023.

###### **B. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka Pembahasan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Pemerintah Daerah pada hari Rabu tanggal 2 November 2022.**

Hasil Rapat Kerja :

1. Terkait Konversi Bank Nagari, untuk Rapat Koordinasi dengan OJK, BI, Kemendagri, Bapemperda DPRD dan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan di Hotel Balairung disepakati di Inisiasi oleh Pemprov.
2. Perlu dilakukan Konsultasi terkait berapa buah jumlah Propemperda untuk Tahun 2023.

**3.Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 :**

**a. DPRD :**

1. Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat ( Fraksi Gerindra)
2. Penyelenggaraan Penyiaran di Daerah (Komisi I)
3. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Komisi II).
4. Penyelenggaraan Perhutanan Sosial (Komisi II).
5. Perlindungan dan Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar (Komisi II).
6. Ranperda tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesehatan (Komisi V)
7. Ranperda tentang Standarisasi Penyelenggaraan dan Pelayanan Kesehatan (Komisi V).

**b. PEMERINTAH DAERAH :**

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Badan Pendapatan Daerah).
2. Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Barat ( Dinas Lingkungan Hidup)
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perseroan terbatas (BPKAD).
4. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan terbatas Penjaminan Kredit daerah Provinsi Sumatera Barat (Biro Perekonomian).
5. Konversi Perseroan terbatas Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Syariah (Biro Perekonomian).
6. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Biro Organisasi).
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 (BPKAD).
8. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan , dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 (BPKAD).
9. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (BPKAD).

**c. Luncuran 2022 ada 4 Ranperda :**

1. Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi kreatif.
2. Ranperda tentang Perubahan Perda 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Ranperda tentang Tanah Ulayat.
4. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan.

**C. Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka Finalisasi Pembahasan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Pemerintah Daerah pada hari Rabu tanggal 15 November 2022.**

Hasil Rapat Kerja :

☑ Luncuran 2022 ada 4 Ranperda, sudah dilakukan pembahasan tahun 2022, tinggal Paripurna pengesahan di tahun 2023 :

1. Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi kreatif.
2. Ranperda tentang Perubahan Perda 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Ranperda tentang Tanah Ulayat.
4. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan.

Sepakat dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2023

☑ Usul dari DPRD, dari 7 buah Ranperda yang diusulkan, Ranperda yang disepakati untuk masuk kedalam Propemperda Tahun 2023 yakni :

1. Ranperda tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat.
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Daerah.
3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial.
4. Ranperda tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesehatan (PMKS).

☑ Selanjutnya dari Pemerintah Daerah, Dari 9 Ranperda yang diusulkan, 8 Ranperda disepakati untuk masuk kedalam Propemperda Tahun 2023 yakni :

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Barat.
3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perseroan terbatas.
4. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pendirian Perseroan terbatas Penjaminan Kredit daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.
7. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.
8. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan untuk Ranperda Konversi Bank Nagari, menunggu setelah dilakukan pertemuan/ Rapat Penyamaan persepsi antara Bapemperda, OJK, BI dan kemendagri yang dilaksanakan rentang waktu tanggal 27 s/d 30 November 2023. Dari hasil pertemuan tersebut, jika Konversi Bank Nagari bisa dilanjutkan berdasarkan penjelasan dari OJK, BI dan Kemendagri maka pembahasan ranperda di lakukan dengan mekanisme di luar Propemperda.

## II. Konsultasi/ Study Banding Bapemperda :

1. Study Banding Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rapat Kerja terkait Hasil Harmonisasi Ranperda tentang Tanah Ulayat dan Tata Kelola Komoditi Unggulan dan Rapat Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah pada tanggal 4 s/d 9 September 2022.

Dari kegiatan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah :
- Kementerian Dalam Negeri menyarankan agar penyusunan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah agar ditunda pembahasannya sampai selesainya Perubahan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - Terkait pendelegasian wewenang terhadap pengelolaan barang milik daerah apakah menggunakan mandatory atau delegasi disarankan untuk berkonsultasi dengan Biro Hukum Kemendagri.
- b. Selanjutnya dilakukan Rapat di hotel Balairung terkait armonisasi Ranperda tanah Ulayat, Ranperda Tata Kelola Komoditi Unggulan dan Ranperda Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Syariah.
- Ranperda Tanah Ulayat, disepakati Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi prakarsa DPRD dengan Judul Tanah Ulayat.
  - Ranperda Tata Kelola Komoditi Unggulan, disepakati direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi prakarsa DPRD.
  - Ranperda tentang Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syariah, Bapemperda menyepakati perlunya pertemuan lanjutan antara Bapemperda, Pemerintah Daerah bersama OJK, BI, Direktorat PHD dan Direktorat Bina Keuangan Daerah Dalam Negeri yang diharapkan akan dijadwalkan dalam Bamus selanjutnya.
2. Konsultasi Bapemperda dalam rangka penyusunan Propemperda Tahun 2023, dilaksanakan ke Direktorat PHD Ditjen Otda pada tanggal 3 s/d 5 November 2022.
- Dari hasil konsultasi yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda, dapat disimpulkan sebagai berikut :
- a. Dalam penyusunan Propemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Pemerintah Daerah harus memperhatikan prinsip omnibus law serta memperhatikan dan analisis Kebutuhan Perda (AKP), jangan sampai Peraturan Daerah mengatur hal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah lainnya atau bersifat tumpang tindih.
- b. Disamping itu perlu juga diperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 5 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang mengisyaratkan agar Penyusunan dan Penetapan Propemperda Provinsi mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya belum menjadi perhatian dalam penetapan Propemperda Provinsi.
- c. Untuk ranperda tentang Konversi Bank Nagari, perlu lebih diperhatikan aturan-aturan yang menjadi dasar penyusunannya dengan melihat konversi Bank Syariah yang telah ada.
- d. Selanjutnya jika memang ada aturan yang bisa disimplifikasikan agar digabung saja.

e. Terkait Perda tentang Penanggulangan Bencana harus diutamakan dan disesuaikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.

3. Konsultasi Bapemperda dalam rangka penyusunan Propemperda Tahun 2023, dilaksanakan ke Direktorat PHD Ditjen Otda pada tanggal 6 s/d 9 November.

#### **B. Pelaksanaan Fungsi Anggaran**

Sesuai dengan lingkup tugas Badan Anggaran, pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 ini Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan pembahasan terhadap Rancangan KUA PPAS Tahun 2023 pada tanggal 31 Juli sd 3 Agustus 2022, Rancangan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022 pada tanggal 22 s/d 25 Agustus 2022, pelaksanaan pembahasan realisasi Semester Pertama, kunjungan kerja komisi dalam rangka peninjauan pelaksanaan kegiatan tahun 2021, evaluasi program dan kegiatan pada APBD Tahun 2022 serta pembahasan arah kebijakan anggaran Tahun 2023, Pokir tahun 2023.

#### **C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan DPRD diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD dan peraturan kepala daerah yang merupakan amanat pelaksanaan peraturan daerah. Dalam mewujudkan fungsi pengawasan DPRD melalui alat kelengkapannya telah melaksanakan berbagai agenda pelaksanaan fungsi pengawasan baik terhadap pelaksanaan APBD, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah maupun terhadap penyelenggaraan program kegiatan pembangunan.

Dari pengawasan terhadap peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat diketahui masih ada peraturan gubernur yang merupakan amanat dari peraturan-peraturan daerah tersebut yang masih belum diterbitkan. Akibatnya peraturan-peraturan daerah yang telah ditetapkan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap APBD Provinsi Sumatera Barat yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, diketahui masih rendahnya penyerapan anggaran bagi pelaksanaan program-program kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui OPD-OPD. Dengan tidak maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai aliran kas yang telah direncanakan berdampak terhadap pergerakan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

#### **D. Kegiatan Kelembagaan DPRD**

##### **1. Reses ke Daerah Asal Pemilihan**

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa salah satu kewajiban dari Anggota DPRD adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menampung dan menyerap aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, reses



c. Daerah Pemilihan Sumbar III	sebanyak 7 orang
d. Daerah Pemilihan Sumbar IV	sebanyak 9 orang
e. Daerah Pemilihan Sumbar V	sebanyak 6 orang
f. Daerah Pemilihan Sumbar VI	sebanyak 11 orang
g. Daerah Pemilihan Sumbar VII	sebanyak 7 orang
h. Daerah Pemilihan Sumbar VIII	sebanyak 7 orang

Aspirasi dan masukan yang dapat dihimpun dari pelaksanaan reses pada setiap daerah pemilihan (Dapil I s.d VIII) secara umum mencakup permintaan kegiatan pembangunan daerah dibidang infrastruktur, pertanian, peternakan, pendidikan dan sektor lainnya, dengan jumlah aspirasi sebagai berikut :

a. Daerah Pemilihan Sumbar I	sebanyak 400 aspirasi
b. Daerah Pemilihan Sumbar II	sebanyak 252 aspirasi
c. Daerah Pemilihan Sumbar III	sebanyak 280 aspirasi
d. Daerah Pemilihan Sumbar IV	sebanyak 324 aspirasi
e. Daerah Pemilihan Sumbar V	sebanyak 240 aspirasi
f. Daerah Pemilihan Sumbar VI	sebanyak 396 aspirasi
g. Daerah Pemilihan Sumbar VII	sebanyak 252 aspirasi
h. Daerah Pemilihan Sumbar VIII	sebanyak 182 aspirasi

Sejalan dengan fungsi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, bahwa DPRD sebagai representatif masyarakat mempunyai kewajiban untuk menampung, menyalurkan dan memperjuangan aspirasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah yang selanjutnya dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diinput dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dan selanjutnya ditindaklanjuti dalam program kerja pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

## 2. Menerima Aspirasi Masyarakat

Nari/Tanggal	Kelompok/Perwakilan Masyarakat	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	Jumlah Massa	Lokasi	Pimpinan/Anggota /Sekretariat DPRD yang Menerima	AKD yang Menerima	KETERANGAN
Selasa, 05 September 2022	Himpunan Mahasiswa Islam	1. Menolak kenaikan BBM; 2. Cabut Kenaikan Tarif Dasar Listrik; 3. Usur Tuntas Mafia Nlrigas	100 orang	Kantor DPRD	Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (H. Idris Syaifur. Lc)	Pimpinan DPRD	Tuntutan Aksi Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) telah di teruskan ke DPR RI dan Bapak Presiden melalui Mensesing
Selasa, 07 September 2022	Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)	(1). Menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat; (2) Meminta pemerintah untuk memberantas mafia dalam pengalokasian BBM bersubsidi kepada masyarakat; (3) Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan tarif dasar listrik	1000 orang	Kantor DPRD	Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (SUPARDI)	Ketua DPRD Beserta Pimpinan Komisi I	Tuntutan Aksi Massa BEM se Sumatera Barat dan aliansi 5 (lima) OHP se Sumatera Barat telah di teruskan ke DPR RI dan Bapak Presiden
Selasa, 07 September 2022	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)	(1). Menolak Kenaikan Harga BBM subsidi (2) Mendesak pemerintah kendalikan harga barang-barang pokok (3) Mendesak pemerintah tunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat dan alihkan anggaran untuk subsidi BBM	30 orang	Kantor DPRD	Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (SUPARDI)	Ketua DPRD Beserta OPD Dinas Pendidikan	Tuntutan Aksi Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) telah di teruskan ke DPR RI dan Bapak Presiden melalui Mensesing
Rabu, 08 September 2022	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat	(1). Menolak Kenaikan Harga BBM subsidi karena akan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat yang baru bangkit setelah pandemi covid 19 (2) Mendesak pemerintah untuk menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung pada masyarakat dan dialihkan kepada subsidi BBM (3) Mendesak pemerintah untuk menyiapkan regulasi terkait dengan pemakaian BBM bersubsidi dan bertanggung jawab atas kebocoran penyaluran subsidi BBM kepada pihak yang tidak berhak (4) Mendesak Menteri keuangan melakukan transparansi dana alokasi subsidi BBM	300 orang	Kantor DPRD	Ketua Komisi 2 dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (SUPARDI)	Ketua Komisi 2 DPRD dan Sekwan OPD Provinsi Sumatera Barat	Tuntutan Aksi Massa BEM se Sumatera Barat dan aliansi 5 (lima) OHP se Sumatera Barat telah di teruskan ke DPR RI dan Menteri Tenaga Kerja
Rabu, 08 September 2022	Kolaborasi Ormas & Tokoh Masyarakat Sumatera Barat	(1) Presiden Jokowi telah gagal memimpin dan menjaga terakan rakyat Indonesia (2) Menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BSM Indonesia ketika harga minyak dunia turun melandai (3) Menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ditengah kondisi rakyat yang masih sulit (4) Jokowi tidak mempertimbangkan suara rakyat dan DPR yang mayoritas menolak kenaikan harga BBM (5) Kami menilai pak Jokowi tidak mampu mengelola BUMN dan SDA Indonesia	150 orang	Kantor DPRD	Ketua Komisi 5 dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat	Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Barat	Tuntutan Aksi Massa BEM se Sumatera Barat dan aliansi 5 (lima) OHP se Sumatera Barat telah di teruskan ke DPR RI dan Presiden RI
Senin, 31 Oktober 2022	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Sumatera Barat	1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode (2) Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan (3) Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait (4) Menuntut dan mendesak Jokowi-makruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanyenya disisa masa jabatannya.	250 orang	Kantor DPRD	Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat	Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat	Tuntutan Aksi Massa BEM se Sumatera Barat dan aliansi 5 (lima) OHP se Sumatera Barat telah di teruskan ke DPR RI dan Presiden RI
Rabu, 7 Desember 2022	Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH) Padang	Mendesak meninjau kembali pengesahan Kitab Undang-undang/Hukum Pidana oleh DPR RI, dan kami menyakini pengesahan KUHP oleh DPR RI sangat tergesa-gesadan sarat akan potensi pelanggaran HAM	250 orang	Kantor DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat		Pengesahan KUHP oleh DPR RI yang sangat tergesa-gesa dan sarat potensi pelanggaran HAM
7 Desember 2022	Lembaga Bantuan Hukum Padang (LBH) Padang	Mendesak meninjau kembali pengesahan Kitab Undang-undang/Hukum Pidana oleh DPR RI, dan kami menyakini pengesahan KUHP oleh DPR RI sangat tergesa-gesadan sarat akan potensi pelanggaran HAM	250 orang	Kantor DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat	Pengesahan KUHP oleh DPR RI yang sangat tergesa-gesa dan sarat potensi pelanggaran HAM
Selasa, 20 Desember 2022	ALIANSI BEM SE SUMATERA BARAT (BEM Univ. Muhammadiyah, BEM UPI YPTK, BEM Univ. Perintis Indonesia, DEMA STA-PIQ)	Menuntut : (1) Mendesak pemerintah mencabut kembali KUHP yang telah disahkan karena masih banyak pasal-pasal yang bermasalah atau kontroversial (2) Mendesak pemerintah memperbaiki atau menghapus pasal-pasal yang bermasalah atau kontroversial dalam KUHP (3) Mendesak Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpu sebelum tanggal 6 Januari 2023 (4) Mendesak pemerintah untuk mengawal tuntutan mahasiswa sampai selesai	500 orang	Kantor DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat	KUHP bermasalah membuat rakyat resah
Kamis, 22 Desember 2022	ALIANSI BEM SE SUMATERA BARAT (BEM Univ. Muhammadiyah, BEM UPI YPTK, BEM Univ. Perintis Indonesia, DEMA STA-PIQ)	Audiensi BEM Se Sumatera Barat dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat terkait KUHP yang meresahkan rakyat	50 orang	Ruang Khusus I DPRD	Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Ketua Komisi 3 (Bapak Ali Tanjung) dan Sekwan DPRD (Bapak Rafis)		KUHP bermasalah membuat rakyat resah

### 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 Tahun 2021/2022 telah dilaksanakan rapat-rapat sebagai berikut :

#### a. Rapat Paripurna

No	Hari/Tanggal/Jam	Kegiatan
1	Kamis, 1 September 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan Terhadap KUPA/PPAS Perubahan Tahun 2022, dengan susunan acara: a. Penyampaian laporan hasil Pembahasan Badan Anggaran; b. Pengambilan Keputusan; c. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama; d. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama; e. Pendapat Akhir Gubernur; f. Penutup.
2	Jum'at, 09 September 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2022, dengan agenda: a. Penyampaian laporan hasil Pembahasan Badan Anggaran; b. Pengambilan Keputusan; c. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama; d. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama; e. Pendapat Akhir Gubernur; f. Penutup
3	Senin, 12 September 2022 Pukul 09.00 Wib	1. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022. 2. Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan, dengan agenda : a. Pengambilan Keputusan; b. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama; c. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama; d. Pendapat Akhir Gubernur; e. Penutup.

4	Selasa, 13 September 2022 Pukul 16.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022.
5	Jumat, 30 September 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2022, dengan agenda: a. Penyampaian laporan hasil Pembahasan Badan Anggaran; b. Pengambilan Keputusan; c. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama; d. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama; e. Pendapat Akhir Gubernur; f. Penutup
6	Sabtu, 01 Oktober 2022 Pukul 10.00 Wib	Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat.
7	Senin, 31 Oktober 2022 Pukul 09.00 Wib  Pukul 14.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar RAPBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Rapat Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembahasan Propemperda Tahun 2023.
8	Selasa, 01 November 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi- Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
9	Rabu, 02 November 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Bapemperda dengan Komisi-Komisi dalam rangka pembahasan Propemperda di Lingkungan DPRD Provinsi. Rapat Bapemperda dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan Propemperda Provinsi Tahun 2023.  Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar atas 4 ranperda:  1. Ranperda tentang Tanah ulayat (Komisi I)  2. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan (Komisi II)  3. Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Penanggulangan Bencana (Komisi IV)

		4. Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif(Komisi V)
10	kamis, 03 November 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Pembahasan hasil evaluasi Kemendagri terhadap perubahan APBD Tahun 2022.
11	Senin, 07 November 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar atas 4 ranperda: 1.Ranperda tentang Tanah ulayat (Komisi I) 2.Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan (Komisi II) 3.Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Penanggulangan Bencana (Komisi IV) 4.Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Komisi V)
12	Selasa, 08 November 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka: 1. PenyampaianTanggapan Gubernur terhadap 3 Ranperda yaitu : a. Ranperda tentang Tanah ulayat (Komisi 1) b.Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan (Komisi I1) c.Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Penanggulangan Bencana(Komisi IV)  2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
13	Rabu, 09 November 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Paripurna dalam rangka: 1. Penyampaian jawaban DPRD terhadap Tanggapan Gubernur atas 3 Ranperda yaitu: a. Ranperda tentang Tanah ulayat (Komisi1) b. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan (Komisi II) c. Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Penanggulangan Bencana(Komisi IV)  2.Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
18	Jumat s.d Selasa, 10 s.d 12 November 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Kerja Komisi-Komisi bersama Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan APBD Tahun 2023.

14	Rabu, 16 November 2022 Pukul 09.00 Wib	<p>Rapat Paripurna dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Propemperda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.</li> <li>2. Penyampaian jawaban DPRD terhadap Tanggapan Gubernur atas 3 Ranperda yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ranperda tentang Tanah ulayat (Komisi I).</li> <li>b. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan (Komisi II).</li> <li>c. Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Penanggulangan Bencana (Komisi IV)</li> </ol> </li> <li>3. Penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.</li> </ol>
15	Rabu s.d Jumat, 16 s.d 25 November 2022 Pukul 09.00 Wib	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rapat Kerja/ Konsultasi/ Studi Banding Banggar dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang APBD Tahun 2023 dan finalisasi.</li> <li>2) Rapat Kerja/ Konsultasi/ Studi Banding Badan Musyawarah dalam rangka pembahasan Rencana Kerja DPRD Tahun 2023.</li> <li>3) Kegiatan komisi-komisi.</li> </ol>
16	Sabtu, 26 November 2022 Pukul 09.00 Wib	<p>Rapat Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2023. Rapat Paripurna dalam rangka: Penetapan Ranperda tentang APBD Tahun 2023 dengan susunan acara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian laporan hasil pembahasan Banggar</li> <li>b. Pengambilan Keputusan</li> <li>c. Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama</li> <li>d. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama</li> <li>e. Pendapat Akhir Gubernur</li> <li>f. Penutup.</li> </ol>

17	Mingsu s/d Rabu, 27 s/d 30 November 2022	<p>1.Konsultasi Awal 4 ranperda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ranperda tentang Tanah ulayat (Komisi I)</li> <li>2) Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan (Komisi II)</li> <li>3) Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Penanggulangan Bencana(Komisi IV)</li> <li>4)Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif(Komisi V)</li> </ol> <p>2.Kegiatan Komisi-Komisi</p>
18	Kamis s.d Sabtu, 1 s.d 3 Desember 2022	<p>1) Pembahasan 4 ranperda yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ranperda tentang Tanah ulayat (Komisi I)</li> <li>2. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan(Komisi II)</li> <li>3. Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Penanggulangan Bencana(Komisi IV)</li> <li>4. Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif(Komisi V).</li> </ol> <p>Rapat Kerja KomisiIII membahastentang Novotel, PIP,tukar guling tanah BNI dan ranah bundo sari petojo.</p> <p>2) Kunjungan kerja komisi-komisi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.</p>
19	Senin s/d Sabtu, 12 s/d 17 Desember 2022	<p>1. Study Banding 4 ranperda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ranperda tentang Tanah ulayat (Komisi I)</li> <li>2) Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan (Komisi II)</li> <li>3)Ranperda tentang Perubahan Perda tentang Penanggulangan Bencana (Komisi IV)</li> <li>4)Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif(Komisi V)</li> </ol> <p>2. Kegiatan Komisi-Komisi</p>

20	Minggu s/d Rabu, 18 s/d 21 Desember 2022	<p>1) Rapat Kerja/Konsultasi akhir dalam rangka pembahasan lanjutan 4 ranperda,yaitu:</p> <p>a.Ranperda tentang Tanah Ulayat. (Komisi 1).</p> <p>b.Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan. (Komisi II).</p> <p>c.Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Komisi IV).</p> <p>d.Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif.(Komisi V).</p> <p>2) Kegiatan Komisi-Komisi</p>
21	Kamis, 22 Desember 2022	<p>Rapat Kerja Pembahasan akhir dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi atas 4 ranperda yaitu:</p> <p>a. Ranperda tentang Tanah Ulayat (Komisi 1).</p> <p>b. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan. (Komisi II).</p> <p>c. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (Komisi IV).</p> <p>d.Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif. (Komisi V).</p>
22	Senin, 26 Desember 2022	Rapat Kerja komisi-komisi dan fraksi persiapan penutupan masa persidangan.
23	Selasa, 27 Desember 2022	<p>Rapat Paripurna dalam rangka:</p> <p>a. Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023.</p> <p>b. b.Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023.</p>

**b. Rapat Badan Musyawarah**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 7 Oktober 2022	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023
2	Selasa, 1 November 2022	Rapat Badan Musyawarah DPRD provinsi Sumatera Barat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tentang Penjadwalan ulang Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023

**c. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Kamis, 10 Februari 2022 Pukul 09.00 Wib	Rapat Bappemperda bersama Pemerintah Daerah dalam rangka membahas Propemperda Tahun 2022
2	Senin, 14 Maret 2022. Pukul 14.00 Wib	Rapat Kerja Bapemperda dalam rangka pembahasan Ranperda di luar Propemperda (Konversi Bank Nagari Konvensional menjadi Bank Nagari Syaria'ah)
3	Rabu, 16 Maret 2022 Pukul 14.00 Wib	Rapat Internal Bapemperda dalam rangka persiapan kegiatan konsultasi dan studi banding Bapemperda
4	Selasa, 5 April 2022 Pukul 11.30 Wib	Rapat Internal Bapemperda dalam rangka : 1. Membahas hasil konsultasi/studi banding ranperda di luar Propemperda 2. Mendengar ekspose tim penyusun NA Ranperda tentang Tata Kelola harga Komoditi dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

**4. Penyelenggaraan Tugas Administrasi**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, pengelolaan administrasi persuratan di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- a. Undangan Sekwan  
Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 65 (enam puluh lima) pucuk surat.
- b. Undangan Ketua  
Undangan Sekwan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang masuk dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) pucuk surat.
- c. Surat Masuk  
Surat yang masuk ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dari instansi pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan maupun dari masyarakat langsung, surat masuk berjumlah sebanyak 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) pucuk surat. Surat-surat yang masuk tersebut selanjutnya diproses dewan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- d. Surat Keluar  
Surat-surat yang masuk ke dewan yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikirimkan ke pihak-pihak terkait, berjumlah sebanyak 551 (lima ratus lima puluh satu) pucuk surat.

## **5. Pelaksanaan Tugas-Tugas Pimpinan**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pimpinan DPRD harus menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan kinerja sebagai Pimpinan DPRD. Berkaitan dengan hal tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, Pimpinan DPRD telah melaksanakan tugas-tugas dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD, baik kegiatan kelembagaan maupun kegiatan yang dilakukan oleh alat kelengkapan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Memimpin rapat-rapat paripurna, rapat pimpinan, rapat gabungan pimpinan, rapat kerja, rapat badan musyawarah dan rapat badan anggaran;
- b. Menghadiri undangan rapat yang dilaksanakan di Kemendagri, pemerintah daerah serta instansi lainnya;
- c. Menghadiri undangan dari pemerintah dalam rangka sosialisasi peraturan perundang- undangan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- d. Menghadiri undangan dari pemerintah daerah dan lembaga lainnya serta melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
- e. Disamping melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat juga telah melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kedudukannya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dalam kapasitasnya sebagai koordinator Komisi-Komisi dan alat kelengkapan Dewan tersebut, Pimpinan DPRD ikut memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembahasan ranperda yang dilakukan oleh Komisi- Komisi dan Panitia Khusus.

## **E. KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN**

### **1. Kegiatan Komisi-Komisi**

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Komisi-Komisi mempunyai tugas sesuai dengan tugas, fungsi dan ruang lingkupnya serta melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah, melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan APBD Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh OPD terkait melalui program kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tersebut. Sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi-Komisi tersebut, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, Komisi-Komisi telah melaksanakan berbagai agenda kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

#### **KOMISI I**

Selama Masa Persidangan pertama Tahun 2022/2023, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya, yaitu Bidang Pemerintahan dan Hukum, dimana Pada tanggal 01 September s/d 31 Desember 2022, Komisi I telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat internal Komisi untuk membahas surat masuk dan kegiatan Komisi sebanyak 3 (tiga) kali, rapat kerja sebanyak 03 (tiga) kali, serta melakukan kunjungan kerja secara berkelompok dalam provinsi untuk monitoring pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi I) sebanyak 11 (sebelas) kali, serta Kunjungan Kerja Luar Provinsi dalam rangka Studi Komparatif pada masa sidang Pertama sebanyak 3 (tiga) kali.

Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 adalah sebagai berikut :

#### **I. Rapat-Rapat Internal Komisi I :**

Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Internal Komisi sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 September 2022 Komisi I melaksanakan rapat Internal Komisi sebagai berikut :

a. Membicarakan masalah Internal Komisi, terutama terkait banyaknya surat masuk yang berkaitan dengan permasalahan tanah yang melibatkan masyarakat dan aparat hukum, sehingga perlu perhatian dari komisi I dalam upaya penyelesaiannya.

b. Membahas Rencana kerja Kegiatan Komisi I, terutama menyangkut Kunjungan Kerja baik Kunjungan Kerja Dalam Daerah dalam rangka Monitoring pelaksanaan Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Komisi I, serta Permasalahan yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi terutama Pelaksanaan Program Pemerintah tentang Bantuan Langsung Tunai akibat dampak kenaikan BBM. Sedangkan kunjungan kerja luar daerah yaitu Study Komparatif sesuai bidang tugas komisi I.

## **II. Kunjungan kerja, rapat mitra, konsultasi dan Study Komparatif**

1. Tgl. 06 s/d 07 September 2022, Kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan pengawasan terhadap implementasi perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari ke Kabupaten Agam.

2. Tgl. 08 s/d 09 September 2022, Kunjungan kerja dalam rangka pengawasan dan Monitoring terhadap Implementasi Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari ke Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil kunjungan, bahwa implementasi perda no. 7/2018 belum dapat di implementasikan disebabkan beberapa hal sbb :

a. Wali Nagari dipilih secara musyawarah mufakat oleh KAN, hal ini tentu menghilangkan hak-hak masyarakat, karna tidak lagi dilakukan pemilihan secara langsung oleh masyarakat seperti saat ini.

b. Keanggotaan maupun kedudukan KAN, tumpang tindih dengan lembaga Bamus. Selain juga sulitnya menentukan serta indikator terkait keanggotaan KAN yang berasal dari unsur ninik mamak, alim ulama dan cadiak pandai.

c. Apabila di Nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari dengan keanggotaan sebagaimana yang diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2018 yaitu perwakilan ninik mamak, cadiak pandai, bundo kanduang, parit paga nagari, maka dimana kedudukan lembaga ninik mamak yang sudah ada saat ini. Hal ini harus dijelaskan sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

2. Tgl. 14 s/d 17 September 2022, rapat kerja dengan mitra kerja dalam rangka pembahasan awal ranperda tentang APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, dimana hasilnya disimpulkan sbb :

a. Anggaran yang tertampung dalam Rancangan APBD Perubahan Tahun 2022, sebesar Rp. 534.395.122.136,-. Dimana besaran Anggaran tersebut tersebar di 16 OPD/Mitra Kerja Komisi I termasuk didalamnya KI dan KPID.

b. Dari total anggaran yang dialokasikan dalam Rancangan APBD Perubahan Tahun 2022 yang telah disampaikan oleh masing-masing Mitra Kerja Komisi I, terjadi penambahan sebesar Rp. 61.932.409.115,- (16 OPD).

c. Adanya penambahan alokasi anggaran yang diberikan oleh TAPD kepada OPD Mitra Komisi I dalam rancangan APBD Perubahan Tahun 2022 ini, disebabkan antara lain, kekurangan Gaji dan TPP, pelaksanaan Event tingkat

Nasional yang akan diselenggarakan oleh beberapa OPD pada bulan November Tahun 2022 ini, pengadaan barang milik daerah dan kendaraan dinas operasional, kegiatan fisik untuk pembangunan/rehab gedung Kantor, serta pemenuhan target kinerja, dll.

- d. Secara prinsip Komisi I dapat memahami alasan terjadinya penambahan anggaran oleh seluruh mitra kerja demi tercapainya target pembangunan daerah yang nantinya berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
  - e. Selain rapat kerja, dilakukan kunjungan lapangan ke Kota Sawah Lunto terkait dengan koordinasi dan fasilitasi perda dan perkada Kabupaten/Kota oleh Provinsi melalui Biro Hukum.
3. Tgl. 19 s/d 20 September 2022. Kunjungan kerja dalam rangka Monitoring terhadap Implementasi Perda No. 7/2018 tentang Nagari, dimana perda tersebut belum dapat di implementasikan.
  4. Tgl. 22 s/d 23 September 2022, Kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pengawasan dan Monitoring terhadap Bantuan Pemerintah terkait dengan pemberian BLT akibat kenaikan BBM.
  5. Tgl. 26 s/d 27 September 2022, Kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pengawasan dan Monitoring terhadap Bantuan Pemerintah terkait dengan pemberian BLT akibat kenaikan BBM.
  6. Tgl. 26 September 2022, rapat kerja Komisi I dengan Tim Penyusun Naskah Akademik perubahan perda No. 6 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan Propemperda, dimana hasil rapat disimpulkan bahwa belum diperlukan perubahan perda karna yang akan diubah hanya beberapa pasal saja dan belum dianggap prinsip sehingga tidak berpengaruh terhadap substansi.
  7. Tgl. 28 s/d 29 September 2022, Kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pengawasan dan Monitoring terhadap Bantuan Pemerintah terkait dengan pemberian BLT akibat kenaikan BBM.  
hasil kunjungan terkait monitoring dan pengawasan terkait BLT sbb :
    - a. Belum optimalnya pendistribusian bantuan pemerintah disebabkan basis data terpadu yang diambil dari DTKS tidak di Upgrade sehingga banyak yang tidak tepat sasaran.
    - b. Permasalahan data sering terjadi terutama saat pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat, mestinya data masyarakat berkaitan dengan status sosialnya yang ada pada setiap tingkatan dan lembaga harus terintegrasi dan tersistematis dalam satu data base yang terpusat sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
  8. Tgl. 3 s/d 4 Oktober 2022, Kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka pengawasan dan Monitoring terhadap Bantuan Pemerintah terkait dengan pemberian BLT akibat kenaikan BBM.

9. Tgl. 10 s/d 11 Oktober 2022, Kunjungan kerja ke Kabupaten Agam dalam rangka pengawasan dan Monitoring terhadap Bantuan Pemerintah terkait dengan pemberian BLT akibat kenaikan BBM.
10. Tgl. 12 s/d 15 Oktober 2022, Study Komparatif (BOP) ke DPRD Provinsi Jawa Barat terkait dengan pola dan mekanisme penganggaran untuk kegiatan reses, Sosper, dan kegiatan alat kelengkapan dewan lainnya.
- Hasil kegiatan :
- a. Untuk Kegiatan reses antara DPRD Jawa Barat dengan DPRD Sumatera Barat relatif sama , kecuali jumlah peserta dan pendamping reses yang ditunjuk dari luar ASN Sekretariat DPRD Jawa Barat oleh Anggota DPRD bersangkutan.
  - b. Perbedaan nomenklatur kegiatan untuk Sosialisasi Perda antara DPRD Jawa Barat dengan DPRD Sumatera Barat, dimana DPRD Jawa Barat kegiatan sosialisasinya dinamakan Sosialisasi Ranperda, bukan Sosialisasi Perda.
  - c. Kegiatan lain di DPRD Jawa Barat yang belum ada di DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah, kegiatan Sosialisasi empat pilar dan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota DPRD Jawa Barat terutama ke Dapil masing-masing.
11. Tgl. 18 s/d 21 Oktober 2022, Study Komparatif ke DPRD Provinsi Riau, terkait dengan Sharing Informasi tentang pola dan mekanisme Pembahasan APBD Tahun 2023 Sesuai Lingkup Tugas Dan Fungsi Komisi I dalam penganggaran kegiatan-kegiatan di Sekretariat DPRD sebagai Mitra Kerja Komisi I, dengan hasil kunjungan antara lain sbb :
- a. Untuk sabtu/minggu/libur nasional tidak ada kegiatan DPRD kecuali reses, reses/sosper tidak ada uang transport masyarakat karna sebelumnya pernah jadi temuan BPK.
  - b. Untuk tahun 2023 DPRD Riau meningkatkan kegiatan kedewanan dengan mengunjungi masyarakat melalui program kegiatan, seperti sosialisasi 4 pilar maupun wawasan kebangsaan, disamping juga kegiatan reses dan Sosper, agar konsolidasi dewan dengan konstituen lebih inten dalam menyongsong pileg, pilpres, maupun pilkada serentak tahun 2024 mendatang, dimana prosesnya akan dilaksanakan sejak awal tahun 2023 yang akan datang, maka perlu diperkuat dengan kegiatan tersebut.
12. Tgl. 03 d/d 04 November 2022, kunjungan kerja ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka pengawasan tentang pendataan masyarakat terkait dengan penerima bantuan BLT akibat dampak kenaikan BBM. Adapun hasilnya, bahwa pendataan masyarakat calon penerima BLT perlu di Upgrade, sehingga tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
13. Tgl. 07 d/d 08 November 2022, kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka pengawasan tentang pendataan masyarakat terkait dengan penerima bantuan BLT akibat dampak kenaikan BBM. Adapun

hailnya, bahwa pendataan masyarakat calon penerima BLT perlu di Upgrade, sehingga tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

14. Tgl. 09 d/d 10 November 2022, kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka pengawasan tentang pendataan masyarakat terkait dengan penerima bantuan BLT akibat dampak kenaikan BBM. Adapun hailnya, bahwa pendataan masyarakat calon penerima BLT perlu di Upgrade, sehingga tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
15. Tgl. 11 s/d 15 November 2022, rapat kerja Komisi I dengan mitra kerja dan kunjungan lapangan terkait dengan pembahasan awal Ranperda APBD Tahun 2023. Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh komisi I bersama mitra kerja, diketahui bahwa dari 16 OPD, terdapat 14 OPD yang masih kekurangan anggaran termasuk KI dan KPID dengan berbagai alasannya, hanya 2 OPD saja yang tidak memerlukan tambahan anggaran dengan alasan evisiensi dan menyesuaikan dengan kebutuhan serta regulasi yang ada. Adapun total anggaran 16 OPD, dapat disimpulkan sbb :
  - APBD P 2022 = 528,249,631,493,-
  - KUA PPAS 2023 = 442,880,185,738,-
  - RAPBD 2023 = 517,553,905,730,-

Jika dilihat perbandingan :

- APBD P 2022 vs RAPBD 2023 terjadi kekurangan = 10,695,725,763,-
- Untuk usulan tambahan setelah pembahasan pada 14 OPD termasuk KI dan KPID total anggaran = 87,841,355,307,-

Dari hasil pembahasan, komisi I dapat memahami usulan tambahan anggaran untuk masing-masing OPD, bahkan komisi I merekomendasikan usulan tambahan untuk beberapa OPD setelah pembahasan dikarenakan belum tertampung dan terpenuhinya anggaran untuk program kegiatan yang strategis dan prioritas sesuai dengan target RPJMD yang telah dijabarkan melalui RKPD.

16. Tgl. 16 d/d 17 November 2022, kunjungan kerja ke Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pengawasan tentang pendataan masyarakat terkait dengan penerima bantuan BLT akibat dampak kenaikan BBM. Adapun hailnya, bahwa pendataan masyarakat calon penerima BLT perlu di Upgrade, sehingga tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
17. Tgl. 25 d/d 26 November 2022, kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Datar dalam rangka pengawasan tentang pendataan masyarakat terkait dengan penerima bantuan BLT akibat dampak kenaikan BBM. Adapun hailnya,

bahwa pendataan masyarakat calon penerima BLT perlu di Upgrade, sehingga tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

18. Tgl. 27 d/d 30 November 2022, Konsultasi awal Ranperda tentang Tanah Ulayat ke Direktorat Jenderal Penetapan hak dan pendaftaran tanah (PHPT) kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Dalam Negeri.

Hasil konsultasi :

- a. Pendataan tanah diseluruh bidang tidak akan lengkap kalau tanah ulayat tidak dikelola. Untuk itu Tanah ulayat harus diidentifikasi dan harus didaftarkan.
- b. Kerjasama diatas tanah ulayat sangat didukung meskipun disisi pendaftaran sudah sejalan dengan yang diinginkan. Tinggal mekanisme bagaimana melakukan identifikasi dan pendataan terhadap tanah ulayat. Yang paling penting adalah bagaimana penghentian terhadap tanah ulayat yang sudah dikerjasamakan.
- c. Pemerintah melalui kementerian sudah konsen terhadap inventarisasi dan identifikasi terhadap tanah ulayat. Pemetaan tanah dapat dikatakan lengkap di seluruh indonesia jika sudah termasuk tanah ulayat. Untuk itu, dalam peraturan daerah tidak perlu dibuat lebih rigid, karena akan susah keluar nanti. Secara aturan dibuatkan secara global.
- d. Untuk tanah ulayat bisa diterbitkan sertipikan HPL dalam rangka pemanfaatan dan perlindungan objek itu sendiri. Namun saat ini terjadi pergeseran-pergeseran dalam tanah ulayat dan komunal, jadi perlu dijelaskan. Dan jika ada ketentuan-ketentuan yang dicabut, perlu penyesuaian dalam ranperda.

19. Tgl. 1 Desember 2022, komisi I melalui Tim pembahasan melakukan rapat kerja bersama tim penyusun naskah akademik dalam rangka penyamaan persepsi dan pemahaman terkait dengan materi muatan yang terkandung didalam ranperda tentang Tanah Ulayat, dengan kesimpulan rapat bahwa proses penyusunan, maupun materi muatan terhadap ranperda tersebut harus memenuhi unsur-unsur formil dengan berpedoman kepada UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selain juga unsur materil dengan melibatkan banyak pihak secara luas dalam memperoleh masukan dan saran, terutama unsur pemangku ulayat yaitu masyarakat hukum adat dan stakeholders lainnya, sehingga ranperda tentang tanah ulayat betul-betul dapat memenuhi kebutuhan hukum terutama pada masyarakat hukum adat.

20. Tgl. 04 d/d 07 Desember 2022, Study Komparatif terkait peran strategis satpol PP dan PPNS dalam Penegakan Perda dan Perkada.

Adapun hasilnya sbb :

- a. Ujung Tombak pelaksanaan penegakkan Perda / Perkada pada Satpol PP DKI Jakarta adalah berada pada Satpol PP tingkat di Kelurahan yang langsung bersentuhan dengan warga masyarakat.
  - b. Hasil kegiatan penegakkan Perda / Perkada di DKI Jakarta di dominasi pelaksanaannya secara Non Yustisial dibandingkan penindakan Yustisial.
  - c. Penindakan dengan Non Yustisia atau dengan sanksi administratif dipandang memiliki proses yang lebih cepat dalam penerapannya karena dapat dilakukan oleh seluruh anggota Pol PP sesuai kewenangannya.
  - d. Penindakan dengan pro Yustisia atau melalui persidangan pidana yustisi tipiring dalam pelaksanaan masih banyak terkendala oleh keterbatasan SDM PPNS Satpol PP.
  - e. Tantangan dalam proses Penegakkan Perda / Perkada di DKI Jakarta adalah menghadapi kondisi Heterogen nya struktur sosial budaya, ekonomi dan tingkat Pendidikan masyarakat / penduduk Jakarta. Sedangkan yang menguntungkan dari sisi internal adalah kewenangan yang dimiliki oleh Satpol Provinsi dikarenakan kekhususannya, yaitu seluruh personil Satpol PP di semua tingkatan hingga kelurahan berada dibawah komando Provinsi, sehingga sangat memudahkan untuk koordinasi dilapangan.
21. Tgl. 12 s/d 17 Desember 2022, Study Banding Ranperda tentang Tanah Ulayat ke Provinsi Bali dan D.I. Yogyakarta. Di Bali hasil kegiatan disimpulkan bahwa masyarakat Bali sangat menjunjung tinggi norma-norma hukum adat yang berlaku secara turun temurun, jika terjadi sengketa terkait dengan tanah adat, maka melalui dinas yang telah dibentuk khusus oleh Pemprov Bali yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat secara langsung terlibat aktif dalam penyelesaiannya dengan mengikutsertakan majelis masyarakat adat Bali. Sedangkan Study Banding di D.I. Yogyakarta diperoleh hasilnya antara lain bahwa, berkaitan dengan keistimewaannya Sehubungan dengan tanah yang dikelola oleh pihak kesultanan ataupun pihak kadipaten, Pemerintah Daerah posisinya hanya memfasilitasi perizinannya. Khusus tanah desa, melalui dinas tata ruang minta izin ke kadipaten untuk digunakan. Kalau ada tanah desa yg dipihak ketigakan, paling tinggi 20 th. Setelah habis masanya harus menyerahkan bangunan diatas tanah kepada desa dengan izin kadipaten/kesultanan. Adapun pedoman dan regulasi yang digunakan oleh Pemerintah D.I. Yoyakarta adalah, UU No. 13 Tahun 2012 tentan Keistimewaan Yogyakarta, Perdais DIY No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten,

- Perdais No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, dan Pergub No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
22. Tgl. 18 s/d 21 Desember 2022, Konsultasi ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Diperoleh beberapa saran dan masukan sbb :
- a. Dalam konsideran mengingat, agar ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
  - b. Dalam pasal pemanfaatan aset nagari harus disebutkan ke rekening mana masuk sewa dari pemanfaatan aset nagari tersebut.
  - c. Tanah Ulayat perlu diinventarisasi, yang mana punya kaum dan mana punya pribadi. Sehingga diharapkan peraturan yang ditetapkan nantinya dapat melindungi hak masyarakat.
  - d. Untuk lebih menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanah Ulayat ini, agar dapat didiskusikan lagi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, karena dalam konsep otonomi daerah harus ada sinkronisasi dari hulu ke hilir.
  - e. Tgl. 28 s/d 29 Desember 2022, kunjungan kerja Komisi I dalam rangka pengawasan dan peninjauan terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan Nagari di Kabupaten Dharmasraya. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah untuk melihat kesiapan Pemerintahan Nagari dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, dimana anggarannya telah dialokasikan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mendatang.

## **KOMISI II**

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Bidang Ekonomi, telah melaksanakan agenda kegiatan rapat-rapat sebanyak 5 (lima) kali seperti : Rapat internal Komisi, rapat kerja/hearing dan Rapat Kerja bersama Pemerinta Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi II), dan melakukan Kunjungan Kerja/Kunjungan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi ( Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka kunjungan kerja masa sidang Pertama Tahun 2022/2023 ini. Untuk lebih jelasnya Agenda kegiatan Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 adalah sebagai berikut :

### **I. Rapat-Rapat Komisi :**

Selama masa persidangan Pertama Tahun 2022/2023, Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 4 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi II/ Bidang Ekonomi
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke komisi II baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah
4. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

**A. RAPAT INTERNAL KOMISI :**

1. Tanggal 01 September 2021, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi II selama masa persidangan Pertama Tahun 2021.
2. Tanggal 04 Oktober 2021 rapat internal Komisi II membahas tentang Lanjutan Jadwal kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi membahas surat-surat masuk dari mitra kerja, masyarakat, LSM, Organisasi sosial politik dan lembaga lainnya.
3. Tanggal 9 November 2021 Rapat internal komisi II membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi II baik kegiatan Komisi-Komisi Dalam Daerah maupun Luar Daerah.
4. Tanggal 26 November 2021 Rapat internal komisi II membahas tentang lanjutan agenda kegiatan komisi II yaitu kegiatan mensosialisasikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan kegiatan Konsultasi Awal Ranperda yang ada di Komisi II.

**B. Rapat Kerja /Hearing :**

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Rapat Kerja :

1. Pada Tanggal 14 sd 15 Nopember 2022 Komisi II melaksanakan Rapat Kerja bersama Mitra Kerja dengan Agenda Pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2022. Dari Rapat Kerja bersama Mitra Kerja tersebut diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh Komisi II dengan mitra kerja dapat diinformasikan sebagai berikut :

- a. Untuk Pendapatan Asli Daerah, untuk tahun 2022 dengan target PAD sebesar Rp. 4.125.558.400,- sedangkan target Pendapatan asli Daerah Tahun 2023 dengan jumlah Rp. 6.138.385.698,- dan terjadi kenaikan sebesar Rp. 2.012.827.298, sehingga diharapkan dapat membantu meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.
- b. Untuk Belanja dapat diinformasikan sebagai berikut :
  - Jumlah APBD Perubahan Tahun 2022 dengan jumlah anggaran Rp. 597.682.081.866,-
  - Jumlah APBD pada KUA PPAS tahun 2023 sebesar Rp. 656.500,461.609
  - Sedangkan Rancangan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 647.921.494.526,-

Terhadap perbandingan APBD Perubahan tahun 2022 dengan Rancangan APBD Tahun 2023 terdapat selisih sebesar Rp. ( 50.239.412.660 )

Sedangkan perbandingan antara jumlah dana pada KUA PPAS Tahun 2023 dengan RAPBD Tahun 2023 terdapat selisih Rp. 137.345.630.431

( Untuk rincian dana pada OPD dapat dilihat dari tabel terlampir.)

## REKOMENDASI

Setelah dilakukan pembahasan maka untuk tahun 2023 masih ada tambahan anggaran untuk OPD Mitra Komisi II sebesar Rp. 12.717.908.440,- dengan rincian sebagai berikut :

### 1.Dinas Kehutanan

Dengan beratnya tugas Dinas Kehutanan tapi tidak ada penmabahan anggaran, Pemerintah telah menetapkan pengelolaan kehutanan merupakan program Provinsi, namun untuk penganggaran belum tampak keseriusan Pemerintah.,

### 2.Biro Perekonomian

Biro Perekonomian tidak mempunyai program yang jelas dan kegiatan yang ada pendampingan. Seharusnya ada program evaluasi terhadap BUMD – BUMD yang telah ada seperti Grafika, Dinamika, Andalas Tuah Sakato dan BUMD bermasalah lainnya. Belum tampak keseriusan Biro Perekonomian untuk melakukan kinerja BUMD – BUMD tersebut..

### 3.Dinas Pangan

a.Untuk mendukung stabilisasi harga pangan pokok, Dinas terkait masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Komoditi	Jumlah	Satuan	Harga	Total
Beras	12.000	Kg	15.000	180.000.000
Cabe	13.200	Kg	65.000	858.000.000
Bawang Merah	12.000	Kg	35.000	420.000.000
Bawang Putih	10.782	Kg	25.000	269.550.000
Minyak	30.000	Kg	15.000	450.000.000
Gula	12.000	Kg	15.000	180.000.000
Telur	10.800	Tray	50.000	540.000.000
Truk Harian	48	Kali	2.087.500	100.200.000
<b>Jumlah</b>				<b>3.000.000.000</b>

Untuk itu diharapkan kepada Banggar dan TAPD untuk dapat mengalokasikan kegiatan tersebut .

b.Dengan menjadikan Toko Tani Indonesia Centre menjadi BLUD karena TTIC tidak bisa membeli produk pertanian yang ada hanya menyalurkan, untuk itu diharapkan permasalahan pendirian BLUD dapat segera diwujudkan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat dibeli dengan harga yang terjangkau.

#### **4. Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura**

- a. Untuk OPD terkait masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp. 6.500.000.000,- yang akan digunakan untuk Kelanjutan Pembangunan Badan Diklat Pertanian yang ada di Kota Bukittinggi terutama untuk finishing arsitektur gedung pekerjaan landscape dan finishing pagar, pekerjaan mekanik dan plubning, pekerjaan elektrikal dan elektronik sebesar Rp. 5.000.000.000 dan Rp. 1.500.000.000 untuk biaya pemeliharaan gedung seperti tenaga keamanan, tenaga kebersihan dan biaya listrik serta biaya lainnya.  
Dengan beroperasinya Gedung balai Diklat Bukittinggi diharapkan akan menjadi sumber PAD bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Terkait dengan pelaksanaan Penas Tani yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, diharapkan ada kejelasan dari Pemerintah Pusat untuk dukungan dana, sehingga tidak membebankan APBD Provinsi Sumatera Barat.
- c. Diharapkan kepada dinas terkait untuk dapat mengembangkan pertanian organik yang banyak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, dengan adanya pertanian organik dapat meningkatkan kualitas tumbuhan dan menjaga unsur hara tanah dengan menggunakan pupuk organik, karena pupuk anorganik pada saat ini sangat langka dan dengan harga yang cukup tinggi. Untuk itu kepada Dinas terkait agar dapat mengupayakan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana membuat pupuk organik.
- d. Permasalahan Irigasi masih menjadi kendala bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu diharapkan sinergi antara dinas pertanian dan dinas PU pengairan agar dapat menuntaskan secara bertahap permasalahan irigasi yang ada di Sumatera Barat

#### **5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

- a. Untuk Sektor ketenagakerjaan masih membutuhkan dana untuk penyelesaian hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan dan pelatihan dan pemeliharaan dan rehabilitasi Gedung BLK milik Provinsi ( BLK Padang panjang dan BLK Payakumbuh ) dan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp. 4.192.000.000
- b. Untuk target 100.000 milenial entrepreneur untuk tahun 2023 agar dapat direalisasikan sesuai dengan target pada RPJMD yang dimulai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, dengan proporsi 20 ribu untuk setiap tahunnya dan aperlu pembagian secara proporsional dengan Kabupaten / Kota..

#### **6. Dinas Kelautan dan Perikanan**

- a. Keramba Jaring Apung ( KJA ) yang ada pada Danau Maninjau yang akan mengancam keberadaan ikan pada kedua danau tersebut. Penggunaan KJA pada saat ini semakin meningkat dari 6.000 menjadi 24.000 dan harus dilakukan penertiban karena dapat merusak endemik ikan khas danau Singkarak seperti ikan bilih, untuk itu keberdaan penggunaan KJA oleh masyarakat perlu dilakukan jalan keluar yang terbaik keberadaan kedua danau tersebut.

- b. Untuk danau Singkarak dan Danau Maninjau harus ada kejelasan dengan Pemerintah Kabupaten, sehingga ada kekuatan hukum untuk penyelamatan ikan yang ada di Danau tersebut, apalagi Danau Singkarak sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai prioritas nasional, untuk itu pendampingan dana dari Provinsi.

**i. Kunjungan Kerja Dalam Daerah :**

Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah sesuai dengan pasal 40 dan 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memiliki Fungsi Legislasi Anggaran dan Pengawasan. Dalam rangka menjalankan kedudukan dan fungsinya, yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, salah satu Tugas dan Fungsi kedewannya adalah Fungsi Pengawasan yaitu berupa Kunjungan Kerja bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dapat dilakukan baik secara kelompok maupun secara perorangan

Pada tanggal **06 s/d. 07 September 2022** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dalam Usaha (Industri Rumah Tangga).

Pada tanggal **08 s/d. 09 September 2022** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kabupaten Solok Selatan dalam rangka melakukan Pengawasan terhadap Program Unggulan Sektor Pertanian yang dapat menghasilkan skala prioritas utama sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada tanggal **16 s/d. 17 September 2022** Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, melaksanakan Kunjungan Kerja Dalam Daerah ke Kota Sawahlunto dalam rangka melakukan Pengawasan terhadap Budidaya madu lebah tak bersengat (Galogalo) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

**Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Bidang Perekonomian melaksanakan Kunjungan Kerja Luar Daerah sebagai berikut :**

***Pada tanggal 12 s/d. 15 Oktober 2022, Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan Study Komperatif terkait Strategi Pemerintah Provinsi Banten Untuk Pengembangan Komoditi Unggulan Sektor Pertanian dan Perkebunan Serta Hilirisasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.***

Dari Study Komperatif yang dilakukan oleh Komisi II ke Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, diperoleh masukan-masukan sebagai berikut :

Sektor pertanian menjadi perhatian Provinsi Banten untuk memperkuat ketahanan pangan.

Sektor pertanian sekarang menjadi perhatian, pada dasarnya produksi beras Banten dari dulu cukup. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan Jakarta. Namun untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok akan diintervensi oleh BUMD Agrobisnis.

Saat ini di Provinsi Banten juga sedang dikembangkan tanaman porang yang mencapai 200 hektar oleh petani dan beberapa pondok pesantren di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pondeglang. Saat ini porang memiliki nilai ekonomi tinggi serta mudah dipasarkan.

Bahkan Pemerintah Provinsi Banten telah memberikan bantuan produksi padi full paket untuk luasan lahan 200 hektar. Selain itu masih ada bantuan untuk pengembangan mina padi dan perkebunan.

Untuk mempercepat pengolahan tanah, pemda telah bantuan sebanyak 120 unit hand tractor.

Pelaksanaan studi banding Ranperda Tata Kelola Komoditi Unggulan dilaksanakan pada tanggal 12 sd 17 Desember ke Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat.

#### **I. Provinsi Jawa Timur**

Studi Banding ke **Provinsi Jawa Timur** dengan melihat pelaksanaan peraturan daerah **Nomor 2 tahun 2010 tentang Tata Kelola Komoditi Pertanian dan Perikanan** adapun masukan dan informasi yang diperoleh sebagai berikut :

- Pelaksanaan perda di Provinsi Jawa Timur terkendala terkait belum ada dukungan peraturan gubernur sebagai regulasi teknis untuk melaksanakan perda tersebut
- Terkendalanya pembangunan pasar induk modern puspa agro yang menjadi bentuk fasilitasi pemerintah daerah dalam mengatur tata kelola komoditi unggulan
- Provinsi Jawa Timur mengatur tata kelola komoditi tembakau sebagai komoditi unggulan daerah
- Provinsi Jawa Timur memberikan jaminan asuransi kepada pekebun tembakau dari pendapatan cukai tembakau sebagai bentuk perlindungan sosial petani tembakau
- Provinsi Jawa Timur menerbitkan perda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani
- Provinsi Jawa Timur mengembangkan aplikasi informasi harga sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada petani.

#### **II. Provinsi Jawa Barat**

Kemudian Studi Banding ke **Provinsi Jawa Barat** dengan melihat pelaksanaan peraturan daerah **Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan** adapun masukan dan informasi yang diperoleh sebagai berikut :

1. Provinsi Jawa Barat mengembangkan pusat distribusi provinsi (PDP) sebagai bentuk fasilitasi pemerintah daerah dalam pemasaran komoditi pertanian.

2. Pusat Distribusi Provinsi di kelola oleh BUMD Agro di Provinsi Jawa Barat
3. Provinsi Jawa Barat juga menyediakan Bank Petani sebagai lembaga keuangan dalam pemberian modal dan jaminan kepada petani
4. Provinsi Jawa Barat juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur terkait tata kelola distribusi pertanian
5. Komoditi unggulan perkebunan di Provinsi Jawa Barat yaitu kopi, teh dan kelapa
6. Provinsi Jawa Barat memfasilitasi petani milenial untuk meningkatkan inovasi terhadap komoditi unggulan.
7. Fasilitasi kepada pekebun bergabung dalam asosiasi sehingga memperoleh akses pasar terhadap komoditi unggulan.
8. Pemerintah daerah seperti dinas perindustrian dan perdagangan memfasilitasi kemasan yang menarik untuk olahan produk komoditi unggulan
9. Pemerintah daerah membangun jejaring kerjasama dengan luar negeri untuk fasilitasi pemasaran komoditi unggulan Provinsi Jawa Barat
10. Melakukan penilaian kepada perusahaan perkebunan yang berada di Provinsi Jawa Barat oleh tim penilai yang dibentuk oleh pemerintah daerah

Perusahaan yang mendapat nilai yang tidak baik atau melakukan pelanggaran perda akan di cabut izin operasional.

### **KOMISI III**

Selama masa persidangan pertama tahun 2022/2023, komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 12 kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut:

1. Membicarakan masalah internal komisi III/bidang keuangan
2. Membahas program kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja kunjungan kerja komisi III/bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3. Silaturahmi dan rapat kerja dengan mitra kerja komisi III
4. Membahas dan menindak lanjuti surat-surat masuk ke komisi III baik dari masyarakat, LSM, maupun dari instansi pemerintah
5. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

**A. RAPAT INTERNAL KOMISI :**

1. Tanggal 10 oktober 2022, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa pertama tahun 2022/2023 serta membahas dan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan masa persidangan Ketiga tahun 2022.
2. Tanggal 02 November 2022, komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat internal membicarakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh komisi III selama masa persidangan pertama tahun 2022/2023 Berdasarkan Jadwal Badan Musyawarah Tanggal 01 November 2022.

**B. Rapat kerja/Hearing**

1. Tanggal 14 s.d 15 September 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Rapat Kerja bersama mitra kerja pembahasan ranperda tentang perubahan APBD Tahun 2022.
2. Tanggal 11 s.d 12 November 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja bersama mitra kerja dalam rangka pembahasan APBD Tahun 2023.
3. Tanggal 01 Desember 2022 Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat mengadakan rapat Kerja Bersama OPD terkait membahas tentang Novotel, Padang Industrial Park, Tukar guling tanah BNI dan Ranah Bundo Sari Petejo.

**C. KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH**

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 19 Kali dengan rincian sebagai berikut:

1. 08 September 2022, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Solok Dalam Rangka Peninjauan Aset SMK N. 1 Gunung Talang.
2. 22 s/d 23 September 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Payakumbuh Dalam Rangka Peninjauan Terhadap koperasi dan UMKM Aisyiah Ranting Matua Hilia.
3. 24 s/d 25 September 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Tanah Datar Dalam rangka Peninjauan Terhadap Aset di kantor

UPTD Samsat Tanah Datar Yang Merupakan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4. 28 September 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan Kerja ke Kabupaten Agam Dalam rangka Peninjauan Terhadap Aset SMA N 3 manggopo yang Merupakan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. 09 s.d 10 Oktober 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke UPTD Samsat Kabupaten Limapuluh Kota Peninjauan Terkait Aset Milik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.
6. 16 Oktober 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Ke Kabupaten Padang Pariaman Peninjauan terhadap Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR).
7. 22 Oktober 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan kerja ke UPTD Tri Murni Kota Padang Panjang Dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait Perkembangan Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. 04 November 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat Kunjungan kerja ke Kabupaten Padang dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan Bidang Perekonomian terkait Perkembangan Koperasi dan UMKM.
9. 05 s.d 06 November 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Agam Dalam rangka Peninjauan Terhadap Perkembangan Aset SMKN 2 Lubuk Basung.
10. 15 November 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Pariaman, Peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM.
11. 08 s.d 09 November 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Agam, Peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM (Kokesra).
12. 02 s.d 03 Desember 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Bukittinggi Peninjauan SMK N 2 yang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
13. 06 s.d 07 Desember 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Payahkumbuh Peninjauan Aset UPTD BLK yang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
14. 10 s.d 11 Desember 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Panti Sosial UPTD PSTW Tresna Werdha di Kabupaten Tanah Datar.

15. 12 s.d 13 Desember 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Pesisir Selatan Peninjauan SM N 1 Lengayang yang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
16. 14 s.d 15 Desember 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Bukittinggi, peninjauan Aset Istana Bung Hatta yang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
17. 16 s.d 17 Desember 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Agam, peninjauan Aset SMA N 1 Baso yang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
18. 18 s.d 19 Desember 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kota Payakumbuh, dalam rangka peninjauan terhadap perkembangan target pajak dan retribusi daerah yang telah dicapai pada tahun 2022.
19. 20 s.d 21 Desember 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Limapuluh Kota, Peninjauan terhadap perkembangan Koperasi dan UMKM Pondok Pesantren Al-Manaar Batu Hampar.

#### **D. KUNJUNGAN KERJA LUAR DAERAH**

Komisi III Bidang keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kunjungan luar daerah sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. 07 s/d 10 November 2022, Komisi III/Bidang Keuangan DPRD Provinsi Sumatera Barat Konsultasi dan koordinasi serta pemantauan terkait dengan perkembangan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar dan PT. Asuransi Bangun Askrida di Jakarta.
2. 27 s/d 30 November 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study komperatif ke Provinsi Jawa Barat tentang optimalisasi pemanfaatan aset yang dipisahkan pada PT. Jaswita (perseroda) hotel Prama Grand Preanger yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

04 s/d 07 Desember 2022, Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Study komperatif ke Provinsi Bali ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali tentang Optimalisasi Pengelolaan Aset dalam rangka untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

#### **KOMISI IV**

Berdasarkan agenda kegiatan DPRD yang telah diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan dengan melaksanakan kegiatan rapat-rapat seperti : Rapat Internal Komisi, Rapat

Kerja bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat (Mitra Kerja Komisi IV), Rapat Pembahasan Ranperda. Selain itu Pimpinan dan Anggota Komisi IV melakukan Kunjungan Kerja/Peninjauan Lapangan Dalam Daerah ke (Kabupaten/Kota se Sumatera Barat) dan melakukan Kunjungan Kerja Luar Provinsi (Konsultasi/Study Banding/Study Komperatif) baik terkait Pembahasan Ranperda maupun dalam rangka Kunjungan Kerja Masa Sidang.

Agenda kegiatan Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **I. Rapat-Rapat Komisi :**

Selama masa persidangan Pertama Tahun 2022/2023, Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat yang menangani Bidang Infrastruktur telah melaksanakan rapat-rapat komisi sebanyak 3 kali dengan uraian sebagai berikut:

##### **A. RAPAT INTERNAL KOMISI :**

Tanggal 11 Oktober 2022, dilaksanakan rapat internal komisi dengan agenda sebagai berikut :

- a. Pembahasan Agenda Kegiatan Komisi IV pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD tanggal 07 Oktober 2022
- b. Pembahasan surat-surat masuk komisi
- c. Hal lain-lain dirasa perlu

##### **B. RAPAT KERJA:**

###### **1) Tanggal 15-16 September 2022**

Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022

Rekomendasi yang dihasilkan :

- a. Terhadap beberapa kegiatan kontrak kritis seperti paket irigasi di Kab. Pesisir Selatan dan Batang Salido dan 9 paket yang dibatalkan karena lahannya tidak tuntas, sebelum ketuk palu harus ada putusnya oleh TAPD.
- b. Terhadap kondisi terjadi pemutusan kontrak maka dana yang telah ada dapat dialokasikan kepada penuntasan/optimalisasi kegiatan yang sangat penting seperti penyelesaian Batang Surantih, Batang Maransi, Batang Nyiur, pembangunan amphiteater di Bukittinggi.
- c. Setiap kegiatan yang dilakukan perlu dirumuskan targetnya apa dan bagaimana koordinasi antar OPDnya.
- d. Pemerintah provinsi harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan pembahasan lahan bagi pembangunan jalan tol agar kelanjutannya dapat dimasukkan pada tahap 3 rencana nasional.

- e. Kawasan Mandeh dapat diberikan anggaran untuk addendum dan dilanjutkan pengerjaannya.
- f. 2% dari belanja infrastruktur dan DAU dialokasikan bagi program antisipasi inflasi dan pemulihan ekonomi.
- g. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah upaya penghentian laju inflasi dengan melakukan pemantauan harga per hari, pelaksanaan pasar murah, komunikasi media agar masyarakat tidak panik, kontrol harga pupuk dan tiket pesawat, penghapusan pajak progresif bagi kendaraan roda dua.
- h. Diharapkan tidak ada silva anggaran di akhir tahun sehingga capaian RPJMD tidak bermasalah untuk itu program yang tidak mungkin terlaksana dapat dialihkan bagi kegiatan skala prioritas yang butuh perhatian.
- i. Penghitungan anggaran di awal tahun agar lebih cermat dengan memperhatikan ketercapaian kinerja 100% sehingga dalam APBD Perubahan tidak ditemui lagi efisiensi anggaran yang cukup besar.
- j. Aturan bupati/walikota terkait kawasan kumuh perlu dievaluasi dan diperbaiki karena indikator kawasan kumuh yang telah ditetapkan sudah tidak relevan lagi dengan fakta di lapangan.
- k. Pengawasan izin tambang harus diperketat terutama yang terkait dengan izin lingkungan hidup.
- l. Kajian terhadap kegiatan di OPD harus dipersiapkan sebelum dianggarkan secara matang agar kendala-kendala yang akan dihadapi dapat diminimalisir sehingga capaian kinerja terlaksana 100%.
- m. Penegakan peraturan daerah di bidang lingkungan hidup harus diberi perhatian.
- n. Perlu dilakukan pengkajian dan penelitian terkait dampak inflasi, kenaikan BBM dan angkutan umum perlu diberi pengecualian kenaikan harga BBM.
- o. Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti maraknya pembangunan liar di kawasan hutan lindung lembah anai dengan melakukan penegakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku.
- p. Inovasi/tindakan terobosan perlu dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi ODOL Plat Luar BA dengan melakukan pemotongan retribusi di jalan. Untuk itu perlu dipersiapkan regulasinya untuk menerapkan inovasi ini.

2) Tanggal 14-15 November 2022

Komisi IV melaksanakan Rapat Kerja bersama Pemerintah Daerah yang menjadi Mitra Kerja Komisi IV dengan agenda Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2023.

Rekomendasi yang dihasilkan :

- a. Arah kebijakan penganggaran bagi Program Kegiatan OPD harus berdasarkan kajian untuk mencapai target RPJMD dan pencapaian visi misi dan program unggulan Gubernur. Untuk itu perlu diperhatikan agar dalam penghitungan anggaran dilakukan secara cermat dan perlu ditetapkan program mana yang menjadi prioritas agar tidak terjadi pergeseran anggaran yang signifikan nantinya.
- b. Banggar bersama TAPD didorong untuk dapat memberi dukungan penganggaran bagi pembangunan infrastruktur agar dapat mencapai 40% dari total APBD dengan melakukan pengurangan belanja kegiatan yang tidak esensial seperti pengadaan pakaian dinas, rapat di hotel, belanja perjalanan dinas agar pembangunan infrastruktur terlaksana secara merata dan berkeadilan di wilayah Sumatera Barat.
- c. OPD diminta untuk menciptakan inovasi dan kreatifitas dalam menetapkan program dan kegiatan yang betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat, yang dapat dibiayai sumber dana dari pusat maupun bantuan internasional sehingga kebutuhan terhadap pelaksanaan program kegiatan tersebut tidak membebani APBD yang terbatas.
- d. Mengingat belum adanya realisasi dari rekomendasi LHP BPK, maka anggaran bagi kelanjutan pembangunan main stadium dan gedung kebudayaan tidak dapat diberikan pada tahun 2023 dan anggaran yang tersedia dalam RAPBD saat ini dialihkan untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur strategis yang belum selesai dan diberikan tambahan anggaran bagi lanjutan pembangunan infrastruktur yang merupakan kewenangan provinsi seperti pembangunan Batang Bawan, Batang Lampasi, Sariak Malai, Batang Langayang, Batang Pasaman, Batang Tingkaran, Batang Manunggal di Nagari Limo Kaum, pembangunan D.I. Ladang Laweh dan D.I. Sicaung, irigasi gunung nago, batang lurus dan maransi, pembangunan jembatan di Sungai Pisang, Jalan Tapus- Muara Sungai Lolo, Jalan Panti-Simpang Empat, Jalan Rao-Rokan Hulu, Jalan Lubuk Buayan-Parit Malintang, Pembangunan PLTA di Kec. Duo Koto Kab. Pasaman.
- e. Dapat diberikan anggaran bagi kegiatan pengkajian pengembangan Kawasan Sinakak, peningkatan pembangunan di sektor transportasi pelabuhan penyeberangan, pengadaan rambu dan marka jalan, kegiatan pencegahan dan mitigasi bencana.
- f. Kepada OPD yang memberikan kontribusi bagi PAD diminta agar dapat menggali sumber penerimaan pendapatan daerah yang dapat diterima dengan adanya pengalihan kewenangan kepada provinsi serta menciptakan program kegiatan yang dapat menggaet investasi terutama di bidang tambang dan pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Karena banyaknya permasalahan yang timbul akibat tidak jelasnya tapal batas wilayah di Kab. Tanah Datar dan Kab. Agam di Nagari Koto Baru Aia

Angek dan Batu Palano, maka pemerintah daerah perlu memberikan dukungan anggaran bagi penyelesaian masalah tersebut.

- h. Terkait dengan rencana pembangunan hotel di Zona C gedung kebudayaan sebelum kebijakannya disetujui maka perlu dilakukan kajian secara cermat terhadap legalitas, kesiapan dana, kelayakan pembangunannya serta prospek pendapatan bagi daerah yang dapat dicapai dari realisasi pembangunan tersebut.
- i. Perlu dipertimbangkan pemberian anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang lebih prioritas dibandingkan dengan rencana pembangunan gedung baru seperti gedung MUI, gedung inspektorat dll.
- j. Penganggaran bagi pembangunan jalan dan infrastruktur harus dipastikan terlebih dahulu kejelasan pembebasan lahannya telah selesai dilakukan, sebelum disetujui pemberian anggarannya.
- k. Mengingat hampir 80% anggaran yang tersedia digunakan bagi pelaksanaan urusan pemerintahan sedangkan program kegiatan OPD yang menyentuh masyarakat sangat sedikit diberi anggaran maka kepada setiap OPD diminta agar melakukan kajian terhadap anggaran yang diajukan sehingga tidak ada lagi pengulangan kegiatan/program yang sama setiap tahunnya namun tidak memberi dampak yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
- l. Capaian program kerja OPD masih rendah, maka peningkatan kinerja harus terlaksana dengan lebih selektif memberikan anggaran hanya untuk program kegiatan yang betul-betul strategis dan dibutuhkan masyarakat serta dapat segera terlaksana.

### C. Rapat Pembahasan Ranperda

Pada Tanggal 1-3 Komisi IV melaksanakan pembahasan terhadap Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dari hasil rapat bersama pemerintah daerah disimpulkan bahwa :

- Rumusan konsideran "Menimbang" perlu diberi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memuat kebutuhan akan perubahan peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana ini.
- Rumusan konsideran "Mengingat" disesuaikan dengan regulasi terbaru.
- Perlu pendalaman dan kajian lebih rinci terhadap beberapa pasal dan bab dalam rancangan peraturan daerah tersebut.
- Untuk pengaturan sektor lain dapat dibuatkan cantolannya agar tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya
- Ranperda harus memuat ketentuan saat pra bencana, saat bencana, maupun saat pasca bencana.
- Perlu ditetapkan apakah perda ini akan mencabut perda sebelumnya atau hanya akan merubah saja.
- BPBD diminta untuk melakukan pembahasan khusus terkait hal-hal spesifik dalam pasal-pasal penanganan bencana daerah oleh pemerintah provinsi.

## II. Kunjungan Kerja Dalam Daerah

### 1. Tanggal 4-5 September 2022

Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :

Monitoring Pembangunan Jalan Alahan Panjang-Pasar Baru di Kab. Solok  
Pembangunan jalan Provinsi Alahan Panjang-Pasar Baru sedang berlanjut.  
Pembangunan jalan ini masih memakai dana DAK tahun 2022 dengan nilai kontrak Rp. 14.791.430.993,79,-.

Pada dasarnya pembangunan ini dilaksanakan sebanyak tiga segmen :

- a. Segmen I 0,3 km
- b. Segmen II 1,487 km
- c. Segmen ke III pembukaan jalan baru sampai ke Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan.

Saat ini sedang diusahakan pemasangan Jembatan Bailey bentang sepanjang 12 m, serta pengangkutan dan pemasangan jembatan beiley tersebut. Pada tahun 2022 ini akan dilakukan pekerjaan land clearing sepanjang 6 km dan galian sepanjang 2 km dari arah Alahan Panjang terdapat kondisi existing dimana merupakan jalan tanah dengan lebar hanya 2 m.

Saran kepada Dinas BMCKTR agar supaya untuk tahun akan datang proses disegerakan, mengingat tanah batu yang ada dilokasi pada dasarnya tidak dapat dikerjakan secara Manual. Sebaiknya menggunakan Blasting/ Dinamic yang memakan proses yang waktu yang agak lama. Selanjutnya bekas galian tanah agar tidak dibuang ke tepi sungai, mengingat akan menimbulkan masalah baru nantinya. Apabila pembangunan jalan ini sesuai dengan target dan tepat waktu, tentu akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar terutama masyarakat di Kabupaten Solok dan Pesisir Selatan. Yang mana disamping melancarkan transportasi masyarakat ke dua Kabupaten juga akan mendongkrak perekonomian masyarakat di dua Kabupaten. Masyarakat Solok akan dengan mudah menjual hasil pertanian mereka ke Kabupaten Pesisir Selatan, begitu pula sebaliknya masyarakat Pesisir Selatan juga akan lebih muda menjual hasil lautnya ke masyarakat Kabupaten Solok dan dapat juga memperlancar perjalanan saudara kita yang dari Pesisir Selatan yang mau ke Provinsi Jambi dan sebaliknya.

### 2. Tanggal 6-7 September 2022

Monitoring Pembangunan Jalan Daerah Irigasi Surantih Nagari Koto Nan Tigo Kecamatan Sutera Kab. Pesisir Selatan

### 3. Tanggal 16-17 September 2022

Monitoring Pembangunan Jalan Batusangkar-Sitangkai dan Batusangkar-Ombilin di Kab. Tanah Datar.

Dari Hasil peninjauan lapangan dapat diinformasikan :

- a. Ruas dan panjang jalan provinsi di Batusangkar-Ombilin, masih banyak kondisi jalannya dari segi lebar jalan masih kecil dan sebagian kualitas jalannya juga banyak berlobang. Oleh karena itu pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar dan masyarakatnya berharap kepada pemerintah provinsi untuk dapat memperlebar dan ditingkatkan kualitasnya.
  - b. Dari hasil peninjauan dilapangan terhadap jalan Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat Jalan Batusangkar-Ombilin, karena kondisi dan kualitas jalan sudah banyak berlobang. Walaupun saat ini dari Simpang Dadok sampai ke Lima Kaum telah selesai di lakukan perbaikan Tambal Sulam, namun masih tersesah lagi dari Kecamatan Rambatan ke Ombilin belum di rehap sama sekali. Ini tentu perlu ditangani dengan segera oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, karena kondisi dan kualitas jalan rusak banyak berlobang. Ruas jalan masih sempit dan pembangunan yang sudah lama tidak diperbaiki.
  - c. Pembangunan jalan Provinsi Batusangkar-Sitangkai di Tanah Datar yang sudah berlangsung selama ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dapat memperlancar akses masyarakat dari Kabupaten 50 Kota untuk melakukan perjalanan ke Kota Bukittinggi, Padang Panjang dan Ke Kabupaten Kota lainnya. Oleh karena itu masyarakat bermohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Anggota DPRD untuk dapat dilanjutkan dan diperbanyak kuantitas dan kualitasnya pembangunan jalan provinsi dilakukan rehab secara kontinyu/berkelanjutan.
4. Tanggal 26-27 September 2022  
Monitoring Daerah Irigasi Pembangunan Penguatan Tebing Batang Bawan di Kab. Agam
- Berdasarkan peninjauan lapangan yang telah dilaksanakan dapat diinformasikan sebagai berikut :
- Pembangunan Penguatan Tebing Batang Bawan sudah mencapai 70 %. Dengan nilai anggaran Rp. 722.198.455,- dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. tetap menurut Bpk H. M Nurnas anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, pembangunan ini sangat kurang bermanfaat sekali. Mengingat kerusakan yang ditimbulkan oleh Batang Bawansaat sekarang ini, seharusnya sudah termasuk darurat bencana yang memerlukan penanganan serius.
  - Melalui pemerintahan Jorong dan Camat Kecamatan Ampek Nagari, diminta agar segera melaporkan kerusakan tersebut secara resmi dalam bentuk surat pemberitahuan darurat bencana kepada Bpk. Gubernur Sumatera Barat dan langsung ditembuskan ke Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dan SDA BK Sumatera Barat. Agar nantinya dapat dibahas dalam pembahasan anggaran supaya dimasukan dalam anggaran 2023 nantinya.
  - Pada kesempatan yang sama Sekretaris Camat dan Ibu Camat Kecamatan Ampek Nagari mengapresiasi Kedatangan atau Kunjungan Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat. Mereka menyanggupi permintaan dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk membuat surat resmi kepada Bpk Gubernur tersebut.

- Disamping permintaan di atas Camat Kecamatan Ampek Angkek juga memohon bantuan lain yang mungkin bisa di salurkan ke Kecamatan Ampek Nagari ini, seperti jalan lingkungan, peningkatan jalan Kewenangan Provinsi dapat ditingkatkan, seperti jalan Simpang Gudang, Jalan Bawan, dan pembangunan wilayah sungai, penguatan tebing dan irigasi lainnya.

5. Tanggal 28 September 2022

Monitoring Daerah Irigasi Pembangunan Bangunan Penguatan Tebing Batang Sariak Malai di Kab. Padang Pariaman

Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pembangunan Penguatan Tebing Batang Sariak Malai baru mencapai 43 %. Dengan nilai anggaran Rp. 2.127.414.883.53,- dari dana DAK Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022. tetap menurut Bpk H. M Nurnas anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, pembangunan ini sangat besar manfaatnya. Mengingat kerusakan yang ditimbulkan oleh Batang Sariak Malai saat sekarang ini sudah sangat merugikan masyarakat di sepanjang aliran Batang Sariak malai ini.
- b. Melalui pemerintahan Jorong dan Camat Kecamatan Ampek Nagari, H.M.Nurnas meminta agar segera melaporkan kerusakan tersebut secara resmi dalam bentuk surat pemberitahuan darurat bencana kepada Bpk Gubernur Sumatera Barat dan langsung ditembuskan ke Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dan SDA BK Sumatera Barat. Agar nantinya dapat dibahas dalam pembahasan anggaran supaya dimasukkan dalam anggaran 2023 nantinya.
- c. Pada kesempatan yang sama Sekretaris Camat dan Ibu Camat Kecamatan Ampek Nagari mengapresiasi Kedatangan atau Kunjungan Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat. Mereka menanggapi permintaan dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk membuat surat resmi kepada Bpk Gubernur tersebut.
- d. Disamping permintaan di atas Camat Kecamatan Ampek Angkek juga memohon bantuan lain yang mungkin bisa di salurkan ke Kecamatan Ampek Nagari ini, seperti jalan lingkungan, peningkatan jalan Kewenangan Provinsi dapat ditingkatkan, seperti jalan Simpang Gudang, Jalan Bawan, dan pembangunan wilayah sungai, penguatan tebing dan irigasi lainnya.

6. Tanggal 2 Oktober 2022

Monitoring Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi di Kab. Pasaman Barat. Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :

Pembangunan akses jalan dan jembatan menuju Pelabuhan Teluk Tapang memiliki peran yang penting untuk membangun konektivitas antar-wilayah di Sumbar dalam rangka memperlancar distribusi logistik terutama untuk Kabupaten Pasaman Barat. Beberapa segmen dikerjakan dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan pemerintah

pusat menggelontorkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) untuk menangani sepanjang 23 Km jalan yang telah dilakukan secara bertahap. Pembangunan infrastruktur jalan menuju Teluk Tapang ini akan dibangun melalui dana APBN namun terdapat beberapa komitmen yang harus dipenuhi Pemprov Sumbar diantaranya, pembangunan empat jembatan penghubung menuju Pelabuhan Teluk Tapang yang telah masuk dalam anggaran provinsi dengan total lebih kurang 50 miliar rupiah dan empat pembangunan jembatan tersebut harus direalisasikan sebelum tahun 2024. Tim dari provinsi akan mempercepat pembangunannya ditahun 2023, akan diupayakan pembangunannya sesegera mungkin dan akan diangsur pembangunannya karena Pelabuhan Teluk Tapang dapat menjadi ujung tombak Sumatera Barat untuk menggerakkan pertumbuhan perekonomian Sumbar khususnya di Pasaman Barat.

Pembangunan Jalan Teluk Tapang – Bunga Tanjung akan mendukung akses jalan ke Pelabuhan Teluk Tapang yang rencananya akan mulai beroperasi di tahun 2024. Pekerjaan pembangunan ruas Jalan Akses Pelabuhan Teluk Tapang – Bunga Tanjung dengan nilai kontrak sebesar Rp. 60,87 miliar oleh penyedia jasa PT. Rimbo Paraduan dan konsultan supervisi PT. Manggala Karya Bangun Sarana KSO PT. Khayyira Engineering Consultan. Lokasi pembangunan jalan yang dikerjakan oleh BPJN Sumatera Barat memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena berada di rawa. Oleh karenanya, desain jalan Teluk Tapang – Bunga Tanjung menggunakan teknologi geotextile dan geogrid. Keberadaan Pelabuhan Teluk Tapang di Pasaman Barat, Sumatera Barat ini akan sangat membantu bagi distribusi hasil perkebunan dan pertambangan yang ada di wilayah Pasaman Barat. Selain itu, karena lokasinya yang tidak jauh dari Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, maka juga akan memberi dampak positif bagi perekonomian Provinsi Sumatera Utara bagian selatan karena dapat memanfaatkan pelabuhan ini untuk distribusi hasil bumi

#### 7. Tanggal 9-10 Oktober 2022

Monitoring Pembangunan Sea Wall Pantai Sasak di Kab. Pasaman Barat

Dalam kunjungan kerja Pimpinan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :

Bahwa telah terjadi abrasi Pantai di daerah Muara Tanjung Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2007. Peristiwa ini berdampak kepada 1000 kk di daerah Muara Tanjung dan Kawasan Wisata sejuta pohon Pinus di Kenagaraan Sasak tersebut. Oleh karena itu warga sangat berharap sekali pembangunan Sewall ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

Ketua Komisi IV (Zulkenedi Said) mengatakan bahwa pembangunan ini akan diusahakan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, mengingat pembangunan Sewall saat ini baru hanya bersipat pencegahan agar abrasi pantai tidak meluas atau semakin parah, bahan material yang dipergunakan

sekarang kurang kualitasnya, yang mana batu krib yang digunakan berukuran kecil-kecil sekali untuk ukuran pencegahan abrasi ini.

PPTK dari SDA BK yakni Bp. Wilman menjelaskan bahwa kendala saat ini yang terjadi dilapangan adalah sulitnya mendapatkan bahan material yang sesuai dengan standar, ini dikarenakan tidak adanya Perda yang mengatur tentang galian C dan material lainnya. Sehingga pihak ke tiga dalam ini para kontraktor kesulitan mencari material yang diperlukan untuk pembangunan Sewall ini.

Terkait hal itu Ketua Komisi IV, bahwa pekerjaan ini memang harus berkelanjutan, sebab pembangunan sekarang baru bersifat pencegahan kerusakan lebih parah. Sementara untuk penyelesaiannya kita laksanakan tahun depak, dengan harapan anggaran tersedia. Dan untuk meyelesaikan pembangunan ini masih dibutuhkan lagi paling sedikit 10 milyar lagi. Mudah-mudahan anggaran yang kita butuhkan dapat dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat. Sekretaris Komisi IV, Bapak Suharjono menyarankan kalau melihat dari kerusakan yang ditimbulkan saat ini kita memang harus memperjuangkan anggaran untuk tahun 2023 nanti, mengingat ini merupakan azaz kehidupan orang banyak. 1000 KK terdampak bukanlah masalah sepele.

#### 8. Tanggal 4-6 November 2022

Monitoring Pembangunan Rabat Beton jalan lingkar pemukiman di Kanagarian Panti Selatan dan Kanagarian Lansek Dadok

Dalam kunjungan kerja Pimpinan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :

Proses pembangunan jalan sepanjang 34 kilometer yang menghubungkan Kanagarian Panti Selatan dan Kanagarian Lansek Dadok di Kab. Pasaman. Hingga saat ini, pembangunan jalan yang menelan biaya mencapai Rp8,7 miliar itu sudah mencapai 80 persen dan 50 persen untuk tahap dua, meski sudah masuk musim hujan, pembangunan jalan yang dibagi dua tahap itu masih terus berlanjut. Jalan Rp5,1 miliar sama Rp3,6 miliar sudah dikerjakan. Dengan perbaikan dan pelebaran jalan ini akan memperlancar distribusi komoditas pertanian hortikultura yang kini menjadi mata pencarian utama warga setempat. Masyarakat dikedua nagari tersebut sangat bersemangat mendukung pembangunan infrastruktur di tempat mereka dan beberapa masyarakat disekitar sana bersedia menghibahkan tanah untuk pembangunan infrastruktur di sekitar Kanagarian Panti Selatan dan Kanagarian Lansek Dadok di Kab. Pasaman. Dengan adanya dukungan dari masyarakat ini diharapkan pembangunan cepat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga pembangunan di wilayah tersebut bisa berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

#### 9. Tanggal 11-13 November 2022

Monitoring Rehab Bangun Jalan Provinsi Guguak Cino – Sawahlunto di Kota Sawahlunto dan rencana Rehab Bangun Jalan Guguak Cino – Satangkai di Kab. Tanah Datar.

Dalam kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :

- a. Ruas dan panjang jalan provinsi di Guguak Cino-Sawahluntoh, masih banyak kondisi jalannya dari segi lebar jalan masih kecil dan sebagian kualitas jalannya juga banyak berlobang. Oleh karena itu pemerintah daerah Kota Sawahluntoh dan masyarakatnya berharap kepada pemerintah provinsi untuk dapat memperlebar dan ditingkatkan kualitasnya.
- b. Dari hasil peninjauan dilapangan terhadap jalan Provinsi yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Barat Jalan Guguak Cino-Sawahluntoh, perbaikan Rehan Bangun jalan terban di Jalan Guguak Cino-Sawahluntoh sedang berjalan. Akan tetapi pekerjaannya terkesan lamban, ini dapat dilihat dari sisa waktu tang ada kurang dari 2 bulan. Sementara pembangunan baru bisa dilaksanakan sekitar 60%. Menurut H. M. Nurnas, pekerjaan ini tidak mungkin dapat terlaksana tepat waktu, mengingat waktu tersisah kurang dari 2 bulan. Oleh karena itu beliau berpesan kepada pihak-pihak terkait, seperti Ka Dinas BMCKTR melalui PPTK Bpk Rinaldi dan Pihak ketiga penyedia jasa, sebaiknya pembangunan ini dievaluasi saja pengerjaannya. Ini mengingat agar supaya tidak terdapat masalah dikemudian hari.
- c. Pembangunan jalan Provinsi Guguak Cino-Sitangkai di Tanah Datar yang sudah berlangsung selama ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena dapat memperlancar akses masyarakat dari Kabupaten 50 Kota untuk melakukan perjalanan ke Kota Bukittinggi, Padang Panjang dan Ke Kabupaten Kota lainnya. Oleh karena itu masyarakat bermohon kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Anggota DPRD untuk dapat dilanjutkan dan diperbanyak kuantitas dan kualitasnya pembangunan jalan provinsi dilakukan rehab secara kontinyu/berkelanjutan.

10. Tanggal 22-23 Desember 2022

Pengawasan lingkungan dan tenaga kerja pada aktifitas PT PN VI OPHIR dan PT AGRO WIRATAMA di Kab. Pasaman Barat

Dalam kunjungan perorangan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :

**PT. Agrowiratama.**

- a. Penanganan limbah di PT. Agrowiratama memakai sistem pengolahan Gas. Artinya limbah di PT. Agrowiratama di oleh menjadi sumber energi Gas yang kemudian dipakai kembali untuk kebutuhan Perusahaan, jadi secara teknis PT. Agrowiratama belum atau tidak memiliki izin unruk membuang limbahnya langsung ke alam luar atau sungai. Dengan teknologi yang mereka miliki sehingga mereka memanfaatkan limbah mereka sebagai sumber energi dan kebutuhan air di perusahaan mereka.
- b. Sedangkan untuk tenaga kerja PT. Agrowiratama tidak ada lagi memakai tenaga kerja PHL. Maneger PT. Agrowiratama Palmon Simbolon mengatakan "semenjak 5 tahun terahir, PT. Agrowiratama tidak lagi memperkerjakan tenaga PHL, artinya semua karyawan yang bekerja saat ini merupakan karyawan tetap di PT. Agrowiratama ini. Artinya kami yang

bekerja sekarang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan tupoksi kerja kami masing-masing.

- c. Sementara untuk berbagi kesejahteraan dengan masyarakat setempat, PT. Agrowiratama memberikan santunan, beasiswa, CSR kepada karyawan dan masyarakat sekitar PT. Agrowiratama dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

#### **PT. PN VI OPHIR**

- a. Penanganan limbah di PT. PN VI memakai sistem proses Grouwing. Artinya limbah di PT. PN VI di oleh sedemikian rupah yang kemudian dibuang kembali ke sungai, jadi secara teknis PT. PN VI memiliki izin untuk membuang limbahnya langsung ke alam luar atau sungai.
- b. Sedangkan untuk tenaga kerja PT. PN VI masihgi memakai tenaga kerja PHL sebanyak 92 orang. Maneger PT. PN VI Zulfekar Sopang mengatakan "tenaga kerja PHL ini merupakan tenaga kerja yang tidak tetap, sebagian besar dari mereka baru bergabung dengan PT. PN VI ini masih kurang 2 tahun. Sementara untuk yang lebih dari 2 tahun akan diberikan kesempatan yang untuk mengikuti tes untuk menjadi karyawan tetap atau lainnya.
- c. Sementara untuk berbagi kesejahteraan dengan masyarakat setempat, PT. PN V memberikan santunan, beasiswa, CSR kepada karyawan dan masyarakat sekitar PT. PN V dan Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

### **III. Kunjungan Kerja Luar Daerah**

1. Studi Komperatif ke Prov. Riau pada tanggal 12-15 Oktober 2022  
Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Studi Komperatif terkait Strategi Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Irigasi ke Bappeda Prov. Riau  
Dari perbincangan dan tanya jawab yang dilakukan diperoleh informasi dan masukan sebagai berikut :
  - Pertumbuhan ekonomi Riau berada sedikit di bawah rata-rata nasional yakni 3,36 sedangkan nasional 3,69
  - Trend IPM Riau berada di atas rata-rata nasional yakni mencapai 72,94, sedangkan nasional hanya 72,29
  - Gini Ration Riau berada sedikit di bawah rata-rata nasional yakni 0,327 sedangkan nasional 0,381
  - Tingkat pengangguran terbuka berada di bawah rata-rata nasional yakni 4,42 sedangkan rata-rata nasional mencapai 6,49
  - Tingkat kemiskinan berada di bawah rata-rata nasional yakni diangka 7,00 sedangkan rata-rata nasional mencapai 9,71

Situasi ini didukung oleh faktor-faktor :

  - a. adanya migas, non migas lemak dan minyak nabati
  - b. Riau memiliki komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, sagu, hutan tanaman industri
  - c. adanya potensi pengembangan industri turunan

Disamping diuntungkan dari sumber daya alam yang melimpah namun Prov. Riau masih memiliki faktor penghambat utama pertumbuhan jangka panjang yakni di sektor keuangan dan infrastruktur seperti :

- a. Terbatasnya akses dan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, air, dan listrik) untuk menunjang konektivitas kawasan industri, pariwisata, sentra produksi pertanian.
- b. Peningkatan kualitas, aksesabilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah Riau-Sumatera Barat, Riau-Sumatera Utara dan Riau-Jambi, Kawasan Strategis Industri : KI Tanjung Buton (KITB), KI Tenayan, KI Kuala Enok dan KI Dumai, Kawasan Strategis Pariwisata : KSPN Rupal dan sekitarnya, Kawasan Istana Siak, Kawasan Candi Muara Takus, Bono dan Pekanbaru,
- c. Abrasi : Terjadi dengan tingkat kekritisannya tinggi sepanjang 167,22 Km,
- d. Pembangunan infrastruktur bagi pulau terluar dan terdepan : P. Rupal, P. Bengkalis, P. Rangsang, P. Padang, P. Merbau.

Terkait hal tersebut pemerintah provinsi Riau telah meningkatkan potensi sumber-sumber pendanaan melalui metode sebagai berikut :

- a. Sinergi Pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
  - b. Pemerintah Daerah dapat melakukan Sinergi Pendanaan.  
Pemanfaatan skema pendanaan daerah seperti dari Kementerian/Lembaga : SBSN, PHLN yakni Peningkatan jalan Teluk Piayi (Kubu) – Batas Sumut – Rupal, Sarpras Konektivitas – SBSN, International Port – PHLN
  - c. Pemanfaatan skema pendanaan daerah dari KPBU/Swasta yakni Pengembangan SPAM Pekanbaru, Jalan tol terintegrasi dengan akses Kawasan Industri Tenayan
  - d. Pinjaman Daerah seperti Konektivitas (jalan, fly over dan lainnya), Penataan kawasan
  - e. DAK seperti jalan daerah, saspras pertanian perikanan
  - f. Pendanaan Inovatif yakni Mengintegrasikan kebijakan PRK dalam pembangunan daerah, al: konservasi lahan gambut, penanganan sampah, energi baru terbarukan, Restorasi Ekosistem, Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)
  - g. Hibah (Pembangunan Dermaga Dumai/Rupal, Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Rupal)
2. Studi Komparatif ke Jakarta pada tanggal 18-21 Oktober 2022
- Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Studi Komparatif terkait sharing pembiayaan pengembangan Landfill TPA Regional ke Kementerian PU PR di Jakarta.
- Dari hasil pertemuan yang telah dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV diperoleh masukan dan saran bagi pemerintah dalam melaksanakan tata kelola sampah di daerah yakni :

- Pengelolaan sampah regional harus menggunakan mazhab pengurangan dan penanganan dimana tindakan pengurangan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sedangkan tindakan penanganan dimotori oleh Pekerjaan Umum.
  - Permalahan persampahan bukan melulu mengenai masalah teknis seperti yang telah diuraikan diatas namun tata kelola sampah yang mesti digerakkan secara sistematis dan masif dibawah komando pemerintah daerah.
  - Pelaksanaan tata kelola sampah memang tidak mudah dan beberapa TPA Regional yang telah ada di Indonesia seperti di Kalimantan Selatan, Serang, banten, Yogyakarta dan Lampung pengelolaannya masih belum optimal, untuk itu diperlukan suatu rencana induk bagi pelaksanaan pengembangan TPA regional dimana harus jelas ditentukan sharing pembiayaan antar daerah serta pemisahan antara legislator dan operator sampahnya.
  - Untuk mengatasi permasalahan sampah di TPA Regional Payakumbuh yang saat ini telah over kapasitas maka dapat ditempuh cara yakni pemerintah provinsi mendorong Kab/Kota untuk terlebih dahulu melakukan pengelolaan sampah secara terpadu sehingga nantinya residu sampah saja yang dikumpul kan ke TPA Regional Payakumbuh.
  - Pemerintah daerah juga perlu memberi edukasi dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk melaksanakan tata kelola sampah sehingga peran serta masyarakat terlaksana dengan melaksanakan pengurangan timbunan sampah rumah tangga, memanfaatkan produk TPS3R hasil daur ulang/ kompos ,memilah sampah dari sumber, mengantar sampah ke TPS3R, serta membayar iuran atau retribusi.
3. Konsultasi Awal terkait Pembahasan Ranperda pada tanggal 27-30 November 2022 ke Jakarta  
Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Konsultasi Awal Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ke BNPB dan Basarnas Pusat di Jakarta
4. Studi Banding terkait Pembahasan Ranperda pada tanggal 12-17 Desember 2022 ke Prov. Bali dan Prov. DIY Yogyakarta  
Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Studi Banding Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ke BPBD Prov. Bali dan BPBD Prov. DIY Yogyakarta
5. Konsultasi terkait Pembahasan Ranperda pada tanggal 18-21 Desember 2022 ke Jakarta
1. Pimpinan dan Anggota Komisi IV melaksanakan Konsultasi Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Direktorat Penanganan Bencana dan Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Kemendagri RI di Jakarta

## **KOMISI V**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Hal ini dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya mempedomani kepada aturan perundang-undangan yang ada, maka pada kesempatan ini Komisi V akan melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Ketiga Tahun 2022 yang dimulai sejak tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 secara garis besar meliputi ; melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau dan mencermati persoalan yang berkaitan dengan Bidang Kesehatan, Bidang Kebudayaan, Bidang Kepariwisata, Bidang Pendidikan, Bidang Sosial, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Kearsipan, serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari hasil peninjauan dan pengawasan ada hal-hal yang dirumuskan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

### **A. RAPAT INTERNAL KOMISI**

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022, Komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat - rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali dengan agenda kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- a. Membicarakan masalah Internal Komisi V/Bidang Kesra.
- b. Membahas dan menindaklanjuti surat-surat masuk ke Komisi V baik dari masyarakat, LSM maupun dari Instansi Pemerintah.
- c. Membahas Program Kerja bulanan yang berkaitan dengan rapat kerja, kunjungan kerja komisi V/Bidang Kesra DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- d. Membahas Ranperda yang dibahas bersama Komisi V DPRD Prov. Sumbar.
- e. Membahas hal-hal lain yang dirasa perlu.

## **B. Rapat Kerja Komisi**

Dalam rangka menyamakan persepsi antar Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka diperlukan koordinasi dengan mitra kerja terkait. Rapat Kerja dengan mitra tersebut selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022 telah terlaksana sebanyak 8 (delapan) kali, diantaranya :

1. Tanggal 19 Agustus 2022, Realisasi Semester Pertama dan Rancangan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022.
2. Tanggal 14 sd 15 September 2022, rapat kerja dalam rangka Pembahasan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun 2022.
3. Tanggal 31 Oktober 2022, rapat kerja dalam rangka Rapat Kerja dalam rangka Upaya Penanganan Dan Pencegah Penyakit Gagal Ginjal Pada Anak-Anak Usia Dini di Sumatera Barat.
4. Tanggal 14 sd 15 November 2022, Rapat Kerja dalam rangka Upaya Penanganan Dan Pencegah Penyakit Gagal Ginjal Pada Anak-Anak Usia Dini di Sumatera Barat.
5. Tanggal 28 November 2022, rapat klerja terkait pembahasan Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
6. Tanggal 1 Desember 2022, rapat kerja terkait Rapat Kerja dalam rangka pengayaan materi Terhadap penyusunan Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif.
7. Tanggal 13 Desember 2022, rapat kerja dalam rangka pembahasan pasal per pasal ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif.
8. Tanggal 20 Desember 2022, rapat kerja dalam rangka pembahasan pasal per pasal dan finalisasi ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

**C. Kunjungan Kerja :**

Untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi V serta untuk mendapatkan masukan dan informasi yang terkait dengan tugas Komisi V selama Persidangan Pertama Tahun 2022, telah melakukan Kunjungan Kerja dalam daerah sebanyak 14 kali dan kunjungan kerja luar daerah sebanyak 4 kali, dengan uraian sebagai berikut :

**1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 14 kali, dengan uraian sebagai berikut:**

1. Tanggal 20 sd 21 Agustus 2022, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang Kesehatan ke Rumah Sakit Ahmad Mochtar (RSAM) Kota Bukittinggi.
2. Tanggal 27 sd 28 Agustus 2022, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan ke SMAN 1 Kota Padang Panjang.
3. Tanggal 29 sd 30 Agustus 2022, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang pendidikan ke Kantor Cabang Dinas Wilayah I Kota Bukittinggi.
4. Tanggal 5 sd 6 September 2022, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang Pendidikan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya di Kabupaten Solok.
5. Tanggal 7 sd 8 September 2022, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang Pendidikan ke SMAN 1 Kota Sawahlunto.
6. Tanggal 16 sd 17 September 2022, Melakukan pengawasan terhadap peninjauan pelaksanaan APBD Tahun 2022 ke SMAN 2 Kabupaten Sijunjung.
7. Tanggal 22 sd 23 September 2022, Melakukan pengawasan terhadap peninjauan pelaksanaan APBD Tahun 2022 ke SMAN 1 V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman.

8. Tanggal 17 sd 18 November 2021, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial ke PSAA Tri Murni Kota Padang Panjang.
9. Tanggal 10 sd 11 Oktober 2022, melakukan pengawasan terhadap peninjauan pelaksanaan APBD Thun 2022 ke SMKN 2 Kota Pariaman.
10. Tanggal 4 sd 6 November 2022, melakukan peninjauan lapangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2022 bidang kesejahteraan rakyat ke SMKN 1 Kota Bukittinggi dan PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak Kabupaten Tanah Datar.
11. Tanggal 7 sd 8 November 2022, Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan ke SMAN 2 Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Tanggal 9 sd 10 November 2022, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan ke SLBN 1 Kota Pariaman.
13. Tanggal 9 sd 10 November 2022, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan ke PSBR Harapan Kota Padang Panjang pada tanggal 11 sd 12 November 2022.
14. Tanggal 2 sd 3 Desember 2022, melakukan peninjauan lapangan dalam rangka pengayaan materi terhadap penyusunan Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ke Kota Padang Panjang.

**2. Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 4 kali, diantaranya sebagai berikut:**

1. Melakukan studi komperatif terhadap “Upaya Dan Program Strategis Dalam Peningkatan Budaya Baca dan Kultur Literasi Secara Berkesinambungan dan Otentisasi Pengelolaan Arsip Elektronik” ke Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 sd 15 Oktober 2022.
2. Studi Komperatif dalam Melakukan studi komperatif terhadap “Rencana Strategis Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kelas Dunia” ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 18 sd 21 Oktober 2022.

3. Studi Komperatif dalam melakukan studi komperatif terhadap "Peningkatan Hak Asasi dan Jaminan Sosial Terhadap Anak melalui Komisi Penyelenggaraan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD)" ke Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 sd 7 Desember 2022.
4. Kunjungan Kerja Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:
  - a. Tanggal 27 sd 30 November 2022 melakukan konsultasi awal dalam rangka Pembahasan ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ke Prov. Bali dan Prov. Jawa Barat ke Ditjen Managemen Strategis Kementerian Pariwisata RI
  - b. Tanggal 12 sd 17 Desember 2022 melakukan studi banding dalam rangka Pembahasan ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ke Prov. Bali dan Prov. Jawa Barat  
Tanggal 18 sd 21 Desember 2022 melakukan konsultasi akhir dalam rangka Pembahasan ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ke Kementerian Dalam Negeri.

#### **1. KUNJUNGAN KERJA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

- a. Tanggal 24 Mei 01 Juli 2022, Studi Banding 1 (satu) Ranperda :
  - Harmonisasi Ranperda usul Inisiatif tentang Tata Kelola Harga Komoditi.
- b. Tanggal 3 s/d 6 Juli 2022, Konsultasi Ranperda :
  - Ranperda tentang Harmonisasi Ranperda usul inisiatif tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya.

#### **2. KEGIATAN BADAN MUSYAWARAH**

Sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya, Badan Musyawarah telah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu :

- a. Menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023.
- b. Menyusun Renja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- c. Memberikan pertimbangan dalam pembentukan Panitia Khusus.
- d. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pimpinan DPRD terkait dengan kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD terkait dengan

kebijakan strategis yang akan ditetapkan oleh DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- e. Memantau pelaksanaan tugas-tugas Komisi dan tugas-tugas dan alat kelengkapan lainnya yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah.

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 ini Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kegiatan berupa Rapat Bamus yang dilaksanakan pada tanggal sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal		Kegiatan
1	Jumat 07 Oktober 2022	Rapat Badan Musyawarah	Lanjutan Penjadwalan Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023
2	Minggu sd Rabu 18 sd 21 September 2022	Kunjungan Kerja Badan Musyawarah	Studi Banding Badan Musyawarah terkait Penyusunan Rencana Kerja DPRD Tahun 2023 ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan
3	Rabu sd Sabtu 16 sd 19 November 2022	Konsultasi dan Studi Banding Badan Musyawarah	Konsultasi Badan Musyawarah ke Ditjen PHD kementrian Dalam Negeri dan studi Banding Badan Musyawarah ke DPRD DKI Jakarta, terkait Rencana Kerja DPRD Tahun 2024
4	Senin sd Kamis 21 sd 24 November 2022	Studi Banding Badan Musyawarah	Terkait Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Musyawarah ke DPRD Provinsi Riau
5	Selasa 01 November 2022	Rapat Kerja Badan Musyawarah	Rapat kerja Tentang Penjadwalan Ulang Kegiatan DPRD Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kinerjanya, Badan Musyawarah juga melakukan studi banding ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi Jawa Barat dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Hasil yang diperoleh dari studi komperatif tersebut, tentu akan menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja Badan Musyawarah.

### 3. KEGIATAN BADAN ANGGARAN

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, kegiatan pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan sebagai berikut :

#### 1. KEGIATAN PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN.

Pada kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yakni :

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

- 3) Pembahasan APBD
- 4) Pembahasan Perubahan APBD
- 5) Pembahasan Laporan Semester
- 6) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 ini, anggaran kegiatan tersebut telah dapat direalisasikan sesuai skedul kegiatan dengan tahapan sebagai berikut :

▪ Matriks pelaksanaan kegiatan (time schedule) :

No	Nama Kegiatan	Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
1	KUA -PPAS Tahun 2023													
2	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022													
3	APBD Tahun 2023													
4	Perubahan APBD Tahun 2022													
5	Pembahasan Laporan Semester 1 Tahun 2022													
6	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021													

Sampai dengan Masa Sidang Pertama Tahun 2022/2023, Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran telah mampu merampungkan 6 (enam) sub kegiatan yakni :

- 1) Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 2) Pembahasan KUA dan PPAS 2023
- 3) Pembahasan Laporan Semester
- 4) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022
- 5) Pembahasan Perubahan APBD Tahun 2022
- 6) Pembahasan APBD Tahun 2023

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran pada Masa Sidang Pertama Tahun 2022/2023 dapat dijelaskan seperti pada tabel dibawah ini:

1) **Lanjutan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  
Tahun 2022.**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Jumat, 26 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat internal Badan Anggaran</li> <li>2. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi</li> <li>3. Rapat Kerja Banggar bersama TAPD Pembahasan Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah</li> </ol>
2	Sabtu - Selasa, 27 – 30 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutan Rapat Kerja Banggar bersama TAPD Pembahasan Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah</li> <li>2. Rapat Kerja Banggar bersama TAPD Pembahasan Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Operasi</li> <li>• Belanja Modal</li> <li>• Belanja Tidak Terduga</li> <li>• Belanja Transfer</li> </ul> </li> <li>3. Rapat Kerja Banggar bersama TAPD Pembahasan Pembiayaan Daerah</li> </ol>
3	Rabu, 31 Agustus 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Finalisasi Banggar bersama TAPD terhadap Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022</li> <li>2. Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Pembahasan Perubahan KUA dan</li> </ol>

		Perubahan PPAS Tahun 2022
4	Kamis, 01 September 2022	Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2022

2) **Pembahasan Perubahan APBD Tahun 2022**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Jumat, 09 September 2022	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022
2.	Senin, 12 September 2022	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022
3.	Selasa, 13 September 2022	Rapat Paripurna dalam rangka Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022
4.	Rabu-Sabtu, 14 - 17 September 2022	Pembahasan awal Rancangan Peraturan Daerah terhadap Perubahan APBD Tahun 2022 oleh Komisi-komisi dengan OPD Mitra Kerja
5.	Minggu - Rabu, 18 - 21 September 2022	Konsultasi Banggar bersama TAPD ke Kementerian Dalam Negeri RI
6.	Kamis - Minggu, 22 - 25 September 2022	Sharing informasi Banggar bersama TAPD ke Pemerintah Daerah Provinsi Riau
7.	Senin, 26 September 2022	1. Rapat internal Badan Anggaran 2. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi 3. Rapat Kerja Banggar bersama TAPD Pembahasan Pendapatan Daerah

8.	Selasa, 27 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutan Rapat Kerja Banggar bersama TAPD Pembahasan Pendapatan Daerah</li> <li>2. Rapat Kerja Banggar bersama TAPD Pembahasan Belanja Daerah : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Operasi</li> <li>• Belanja Modal</li> <li>• Belanja Tidak Terduga</li> <li>• Belanja Transfer</li> </ul> </li> </ol>
9.	Rabu, 28 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lanjutan Rapat Kerja Banggar bersama TAPD Pembahasan Belanja Daerah</li> <li>2. Rapat Kerja Banggar bersama TAPD Pembahasan Pembiayaan Daerah</li> <li>3. Rapat Kerja Banggar bersama TAPD Pembahasan SILPA</li> </ol>
10	Kamis, 29 September 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Finalisasi Banggar bersama TAPD terhadap Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022</li> <li>2. Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022</li> </ol>
11	Jumat, 30 September 2022	Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022

3) **Pembahasan APBD Tahun 2023.**

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1.	Senin,	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah APBD

	31 Oktober 2022	Tahun 2023
2.	Selasa, 01 November 2022	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2023
3.	Kamis, 03 November 2022	Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2023
4.	Jumat - Selasa, 11 - 15 November 2022	Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2023
5.	Rabu-Sabtu, 16 - 19 November 2022	Konsultasi Badan Anggaran bersama TAPD ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI sekaligus melaksanakan Rapat Kerja Banggar dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2023 bersama TAPD di Jakarta
6.	Minggu-Rabu, 20 - 23 November 2022	Studi Banding Badan Anggaran bersama TAPD ke DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus melaksanakan Rapat Kerja Banggar dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun 2023 bersama TAPD di Jakarta
7.	Kamis-Jumat, 24 - 25 November 2022	Lanjutan Rapat Kerja Banggar bersama TAPD sekaligus Finalisasi Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2023
8.	Sabtu, 26 November 2022	1. Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Pembahasan Ranperda APBD Tahun 2023 2. Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD Tahun 2023

#### 4. KEGIATAN BADAN KEHORMATAN

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan dewan, yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menjaga harkat, martabat dan marwah lembaga DPRD yang diimplementasikan melalui pengawasan terhadap sikap, prilaku, norma dan disiplin pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang termaktub dalam PP Nomor 12 Tahun 2018. Pada Masa Persidangan Pertama tahun 2022/2023, Badan Kehormatan DPRD telah melaksanakan agenda sesuai dengan tugas dan kewenangan Badan Kehormatan DPRD antara lain :

1. Pada tanggal 22 s.d 24 September 2022 melaksanakan studi banding Badan Kehormatan terkait penyusunan kode etik DPRD ke DPRD DKI untuk mendapatkan masukan, antara lain:
  - a. Sejuahmana sanksi yang bisa diberikan kepada anggota DPRD yang melanggar Kode Etik dan bagaimana cara mengelompokan sanksi tersebut sanksi peringatan lisan, tertulis, sanksi ringan, sedang dan berat)
  - b. Bagaimana kita bisa menyelaraskan pengaturan tentang norma, prilaku anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagai anggota DPRD yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan
  - c. Seperti apa pengaturan dalam kode etik DPRD DKI terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DPRD
  - d. Bagaimana mengimplementasi hubungan kerja yang sejajar dan kemitraan strategis antara DPRD dan Kepala Daerah dalam Kode Etik DPRD
2. Pada tanggal 1 November 2022, pukul 10.00 wib, menerima pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok Selatan untuk konsultasi Tata Beracara, yang diterima oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat
3. Rapat Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan, tanggal 3 November 2022 diruangan Badan Kehormatan dengan keputusan rapat :
  - a. Pembentukan dan pembahasan Pansus Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat diagendakan awal tahun 2023
  - b. Penegakan sanksi perorangan terhadap ketidakhadiran dewan dalam rapat paripurna, belum bisa dilaksanakan karena Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat masih dalam tahap penyusunan di tingkat tenaga ahli DPRD provinsi Sumatera Barat, untuk itu diminta masing-masing ketua fraksi memberikan tegus lisan/tertulis kepada dewan yang absen dalam setiap paripurna atau rapat di tingkat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lainnya
  - c. Studi Banding Evaluasi Kinerja Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat direncanakan pada tanggal 07 s.d 10 November 2022, ke DPRD Provinsi Riau
4. Studi Banding Badan Kehormatan DPRD tanggal 7 s.d 10 November 2022 ke Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau, pertemuan yang dihadiri oleh Ketua dan wakil ketua Badan Kehormatan DPRD Riau, disampaikan bahwa Badan Kehormatan Riau telah merevisi peraturan DPRD terkait Kode Etik dan Tata beracara serta Badan kehormatan telah menyampaikan surat edaran untuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau terkait penegakan kode etik anggota DPRD Riau, terutama kehadiran dalam rapat paripurna.

5. Menghadiri penyelenggaraan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada tanggal 12 Desember 2022 di Hotel Bidakara, di Jakarta, pergelaran perdana MKD award tahun 2022, dengan tema "Apresiasi untuk para pejuang etika Lembaga DPR RI, yang diikuti oleh Bapak Suwirpen, S.Sos Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, MKD DPR

## 5. KEGIATAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, berdasarkan jadwal Kegiatan DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yaitu Pembentukan Peraturan Daerah. Pada Masa Persidangan Tiga Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melaksanakan agenda kegiatan seperti : Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah, Harmonisasi, Konsultasi serta Study Banding Bapemperda.

### A. Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	Selasa, 24 Mei 2022	Pembahasan Hasil Harmonisasi 2 Ranperda usul Inisiatif DPRD tentang Tata Kelola Harga Komoditi dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana serta Ekspose Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda tentang Tanah Ulayat dan Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2	Selasa, 07 Juni 2022.	Lanjutan Rapat Kerja Bapemperda terkait Hasil Harmonisasi 2 Ranperda usul Inisiatif DPRD tentang Tata Kelola Harga Komoditi dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana

### B. Kunjungan Kerja dalam rangka Konsultasi, Studi Banding dan Harmonisasi

1. Study Banding Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda usul Inisiatif tentang Tata Kelola Harga Komoditi ke Pemerintah Provinsi Bengkulu, pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juli 2022.  
Dari hasil Study Banding yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda, dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - Tata Kelola Harga Komoditi di Provinsi Bengkulu diatur dengan Peraturan Gubernur.
  - Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait agar petani tidak dirugikan.
2. Konsultasi Bapemperda terkait Harmonisasi Ranperda usul inisiatif tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya, dilaksanakan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI pada tanggal 3 s/d 6 Juli 2022.

Dari hasil konsultasi yang telah dilaksanakan oleh Bapemperda, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pemerintah pusat sangat mengapresiasi penyusunan ranperda tentang Tanah Ulayat ini karena sangat membantu Pemerintah dalam penerapan PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan atas Tanah, satuan Rumah susun dan pendaftaran tanah.
- Karena regulasi yang sudah berkembang terkait pendaftaran tanah dengan keluarnya UU tentang cipta kerja dan PP Nomor 18 Tahun 2021 maka sebaiknya perda tentang pemanfaatan tanah ulayat dicabut sehingga judul Ranperda yang semula Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan pemanfaatannya menjadi tentang Tanah Ulayat saja.
- Pemerintah Daerah perlu berperan aktif dalam keberadaan tanah ulayat, serta penghormatan terhadap keberadaan tanah ulayat tersebut dengan menetapkan subyeknya, penetapan batas, lokasi tanah ulayat dimana saja dan aturan intern di masyarakat hukum ulayat itu.
- Terkait putusan Mahkamah konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Ciptaker yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan ranperda ini sebenarnya tidak lagi menjadi masalah karena dengan telah diubahnya UU Nomor 12 Tahun 2011 dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 maka persoalan inskonstitusional selesai, sedangkan terkait materi yang menjadi sorotan publik perlu diperbaiki oleh pemerintah sesuai dengan yang dimohonkan pemohon khususnya menyangkut ketenagakerjaan, badan riset dan beberapa lainnya tidak spesifik terhadap pengaturan tanah.

## **6. KEGIATAN FRAKSI-FRAKSI**

### **Fraksi Partai Gerindra**

**I. Rapat Fraksi Partai Gerindra dilaksanakan dengan pokok pembahasa sebagai berikut :**

- 1.Senin, 5 September 2022 , Rapa Fraksi Partai Gerindra dalam rangka persiapan Pandangan Umum Fraksi terhadap pengantar rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 2022.
- 2.Kamis, 29 September 2022, Rapat Fraksi Partai Gerindra dalam rangka Persiapan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022.
- 3.Selasa, 01 Nobvember 2022, Rapat Fraksi Partai Gerindra dalam rangka persiapan penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- 4.Jumat, 11 November 2022, Rapat Fraksi Partai Gerindra dalam rangka persiapan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengaembangan Ekonomi Kreatif.

5. Jumat , 25 November 2022, Rapat Fraksi Partai Gerindra dalam rangka persiapan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi tentang APBD Tahun 2023.
6. Rabu, 21 Desember 2022, Rapat Fraksi Partai Gerindra dalam rangka persiapan penyampaian pendapat Akhir Fraksi terhadap Rapenda Ekonomi Kreatif.

## **II. Laporan Kegiatan Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :**

1. Senin, 5 September 2022 Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022.
2. Selasa, 6 September 2022, Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022.
3. Rabu, 7 September Rapat Paripurna dalam rangka Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022.
4. Kamis, 29 September 2022 Rapat Kerja Pembahasan Akhir dalam Rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2022.
5. Jumat, 30 September 2022, Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2022
6. Selasa, 01 November 2022, Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
7. Kamis, 3 November 2022, Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
8. Jumat, 11 November 2022, Rapat Paripurna dalam rangka
  1. Penyampaian Tanggapan Gubernur terhadap 3 Ranperda yaitu
    - a. Rabperda tentang Tanah ulayat
    - b. Ranpoerda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan
    - c. Ranperda tentang Penanggulangan Bencana
  2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
9. Rabu, 16 November 2022, Rapat Paripurna dalam rangka
  1. Penetapan Propemperda Provinsi Sumatera Barat tahun 2023
  2. Penyampaian jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas 3 Ranperda yaitu :
    - a. Ranperda tentang Tanah ulayat
    - b. Ranpoerda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan
    - c. Ranperda tentang Penanggulangan Bencana
  3. Penyampain jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
10. Sabtu, 26 November 2022, Rapat Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2023

11. Kamis 22, Desember 2022, Rapat kerja Pembahasan akhir dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif
12. Selasa, 27 Desember 2022, Rapat Paripurna dalam rangka
  1. Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023
  2. Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2020 dan pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023.

## **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

### **A. Rapat-Rapat Fraksi**

Selama masa Persidangan Pertama September s.d Desember 2022 ini Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 9 (sembilan) kali yaitu:

**1. Senin, 12 September 2022**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan APBD Perubahan Tahun 2022.

**2. Kamis, 29 September 2022**

Rapat Fraksi dengan Agenda Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda APBD Perubahan Tahun 2022.

**3. Ahad, 02 Oktober 2022**

Rapat fraksi dengan agenda Follow Up Kenaikan BBM dan lain-lain yang dianggap perlu

**4. Sabtu, 22 Oktober 2022**

Menerima kunjungan dari perwakilan Peduli Kesehatan se-Sumatera Barat

**5. Selasa, 01 November 2022**

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD tahun 2023

**6. Selasa, 11 November 2022**

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pengembangan ekonomi kreatif

**7. Kamis, 26 November 2022**

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD Provisni Sumatera Barat tahun 2023

**8. Kamis, 22 Desember 2022**

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap 4 Ranperda tentang:

- a. Tanah Ulayat
- b. Tata Kelola Komoditi Unggulan
- c. Perubahan atas perda Prov. Sumbar Nomor 5 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
- d. Pengembangan ekonomi kreatif

**B. Kegiatan Lain-lain**

Disamping mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PKS juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

**1. Senin, 5 September 2022**

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2022.

**2. Selasa, 6 September 2022**

Rapat Paripurna Dalam Rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2022.

**3. Rabu, 7 September 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd tahun 2022.

**4. Jum'at, 30 September 2022**

Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2022.

**5. Sabtu, 1 Oktober 2022**

Rapat Paripurna istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera barat.

**6. Senin, 31 Oktober 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar RAPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

**7. Selasa, 01 November 2022**

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

**8. Rabu, 02 November 2022**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar atas 4 ranperda:

1. Tanah Ulayat
2. Tata Kelola Komoditi Unggulan
3. Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana
4. Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

**9. Kamis, 03 November 2022**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda APBD provinsi sumatera barat tahun 2023.

**10. Jum'at, 11 November 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka

- a. Penyampaian jawaban DPRD terhadap Tanggapan Gubernur terhadap 3 Ranperda yaitu:
  1. Tanah Ulayat
  2. Tata Kelola Komoditi Unggulan
  3. Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana
- b. Penyampaian pandangan umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

**11. Rabu, 16 November 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penetapan propemberda provinsi sumatera barat tahun 2023.
- b. Penyampaian jawaban DPRD terhadap tanggapan gubernur atas 3 ranperda yaitu:
  1. Tanah Ulayat
  2. Tata Kelola Komoditi Unggulan
  3. Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana

- c. Penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

**12. Sabtu, 26 November 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan ranperda tentang APBD tahun 2023.

**13. Selasa, 27 Desember 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian laoran reses masa persidangan pertama tahun 2022/2023
- b. Penutupan masa sidang pertama tahun 2022/2023 dan pembukaan masa persidangan kedua tahun 2022/2023.

**Fraksi Partai Demokrat**

- I. Rapat Fraksi Partai Demokrat dilaksanakan dengan pokok pembahasa sebagai berikut :

1. Pada hari Senin Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUPA – PPAS Perubahan Tahun 2022.
2. Pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD Tahun 2022.
3. Pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2022.
4. Pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
5. Pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
6. Pada hari Sabtu, tanggal 26 November 2022, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun 2023.

7. Pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, Rapat Fraksi dalam rangka Pembahasan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

## **II. Laporan Kegiatan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumatera Barat sebagai berikut :**

1. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, Pukul 14.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap KUPA – PPAS Perubahan Tahun 2022.
2. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan APBD Tahun 2022.
3. Menghadiri Kerja Pembahasan Akhir pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, Pukul 16.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap RAPBD Perubahan Tahun 2022.
4. Menghadiri Rapat Paripurna Istimewa pada hari Sabtu, tanggal 1 Oktober 2022, Pukul 10.00 Wib, dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat.
5. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
6. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Jum'at, 11 November 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pengembangan Ekonomi Kreatif
7. Menghadiri Rapat pada hari Sabtu, 26 November 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
8. Menghadiri Rapat Kerja Pembahasan Akhir pada hari Kamis, 22 Desember 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
9. Menghadiri Rapat Paripurna pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2022, Pukul 09.00 Wib, dalam rangka Penyampaian Laporan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/ 2023 dan Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/ 2023 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2022/2023.

## **Fraksi Partai Amanat Nasional**

### **I. Rapat-Rapat Fraksi**

Fraksi PAN DPRD Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (6) enam kali selama pada Masa Persidangan Pertama, dari bulan September s/d Desember 2022 ini yaitu :

**1.Selasa, 6 September 2022**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2022.

**2.Rabu, 28 September 2022**

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2022.

**3.Senin, 31 Oktober 2022**

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pandang Umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBD provinsi sumatera barat tahun 2023

**4.Selasa, 1 November 2022**

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pandang Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

**5.Jum'at, 25 November 2022**

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

**6.Rabu, 21 Desember 2022**

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap atas 4 Ranperda yaitu:

- 1.Tanah Ulayat
- 2.Tata Kelola Komoditi Unggulan
- 3.Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana
- 4.Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

### **II. KEGIATAN LAIN-LAIN**

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PAN juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

**1.Senin, 5 September 2022**

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2022.

**2.Selasa, 6 September 2022**

Rapat Paripurna Dalam Rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2022.

**3.Rabu, 7 September 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2022.

4. Jum'at, 30 September 2022

Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2022.

5. Sabtu, 1 Oktober 2022

Rapat Paripurna istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat.

6. Senin, 31 Oktober 2022

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar RAPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

7. Selasa, 01 November 2022

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

8. Rabu, 02 November 2022

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar atas 4 Ranperda:

1. Ranperda tentang Tanah Ulayat
2. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan
3. Ranperda tentang Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana
4. Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

9. Kamis, 03 November 2022

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

10. Jum'at, 11 November 2022

Rapat Paripurna dalam rangka :

a. Penyampaian jawaban DPRD terhadap Tanggapan Gubernur terhadap 3 Ranperda yaitu:

1. Tanah Ulayat
2. Tata Kelola Komoditi Unggulan
3. Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana

b. Penyampaian pandangan umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

11. Rabu, 16 November 2022

Rapat Paripurna dalam rangka:

a. Penetapan PropemPerda Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

b. Penyampaian jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas 3 Ranperda yaitu:

1. Tanah Ulayat

2. Tata Kelola Komoditi Unggulan
3. Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana
- c. Penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

12. Sabtu, 26 November 2022

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang APBD tahun 2023.

13. Selasa, 27 Desember 2022

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian laporan Reses Masa Persidangan Pertama tahun 2022/2023
- b. Penutupan Masa Sidang Pertama tahun 2022/2023 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua tahun 2022/2023.

## Fraksi partai Golkar

### I. Rapat-Rapat Fraksi

Fraksi Partai GOLKAR DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (6) enam kali selama Masa Persidangan Pertama, dari bulan September s/d Desember 2022 ini yaitu :

1. Selasa, 6 September 2022

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2022.

2. Rabu, 28 September 2022

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2022.

3. Senin, 31 Oktober 2022

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pandang Umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBD provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

4. Selasa, 1 November 2022

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pandang Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

5. Jum'at, 25 November 2022

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

6. Rabu, 21 Desember 2022

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap atas 4 Ranperda yaitu:

1. Tanah Ulayat
2. Tata Kelola Komoditi Unggulan
3. Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana
4. Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

## II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi Partai GOLKAR juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Senin, 5 September 2022

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2022.

2. Selasa, 6 September 2022

Rapat Paripurna Dalam Rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2022.

3. Rabu, 7 September 2022

Rapat Paripurna dalam rangka jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2022.

4. Jum'at, 30 September 2022

Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2022.

5. Sabtu, 1 Oktober 2022

Rapat Paripurna istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat.

6. Senin, 31 Oktober 2022

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar RAPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

7. Selasa, 01 November 2022

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

8. Rabu, 02 November 2022

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar atas 4 Ranperda:

1. Ranperda tentang Tanah Ulayat

2. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan

3. Ranperda tentang Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana

4. Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

9. Kamis, 03 November 2022

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

10. Jum'at, 11 November 2022

Rapat Paripurna dalam rangka :

a. Penyampaian jawaban DPRD terhadap Tanggapan Gubernur terhadap 3 Ranperda yaitu:

1. Tanah Ulayat

2. Tata Kelola Komoditi Unggulan

3. Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana

b. Penyampaian pandangan umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

**11. Rabu, 16 November 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penetapan PropemPerda Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.
- b. Penyampaian jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas 3 Ranperda yaitu:
  1. Tanah Ulayat
  2. Tata Kelola Komoditi Unggulan
  3. Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana
- c. Penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

**12. Sabtu, 26 November 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang APBD tahun 2023.

**13. Selasa, 27 Desember 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian laporan Reses Masa Persidangan Pertama tahun 2022/2023
- b. Penutupan Masa Sidang Pertama tahun 2022/2023 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua tahun 2022/2023..

## **Fraksi PPP-NasDem**

### **I. Rapat-Rapat Fraksi**

Fraksi PPP - NasDem DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak (6) enam kali selama Masa Persidangan Pertama, dari bulan September s/d Desember 2022 ini yaitu :

**1. Selasa, 6 September 2022**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2022.

**2. Rabu, 28 September 2022**

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2022.

**3. Senin, 31 Oktober 2022**

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pandang Umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBD provinsi sumatera barat tahun 2023

**4. Selasa, 1 November 2022**

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pandang Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

**5. Jum'at, 25 November 2022**

Rapat Fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

**6. Rabu, 21 Desember 2022**

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap atas 4 Ranperda yaitu:

1. Tanah Ulayat
2. Tata Kelola Komoditi Unggulan
3. Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana

#### 4. Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

### II. Kegiatan Lain-lain

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PPP - NasDem juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Senin, 5 September 2022

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2022.

2. Selasa, 6 September 2022

Rapat Paripurna Dalam Rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2022.

3. Rabu, 7 September 2022

Rapat Paripurna dalam rangka jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2022.

4. Jum'at, 30 September 2022

Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2022.

5. Sabtu, 1 Oktober 2022

Rapat Paripurna istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat.

6. Senin, 31 Oktober 2022

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar RAPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

7. Selasa, 01 November 2022

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

8. Rabu, 02 November 2022

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar atas4 Ranperda:

1. Ranperda tentang Tanah Ulayat

2. Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan

3. Ranperda tentang Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana

4. Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

9. Kamis, 03 November 2022

Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian jawaban gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

10. Jum'at, 11 November 2022

Rapat Paripurna dalam rangka :

- a. Penyampaian jawaban DPRD terhadap Tanggapan Gubernur terhadap 3 Ranperda yaitu:
  1. Tanah Ulayat
  2. Tata Kelola Komoditi Unggulan
  3. Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana
- b. Penyampaian pandangan umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

11. Rabu, 16 November 2022

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penetapan PropemPerda Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.
- b. Penyampaian jawaban DPRD terhadap tanggapan Gubernur atas 3 Ranperda yaitu:
  1. Tanah Ulayat
  2. Tata Kelola Komoditi Unggulan
  3. Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana
- c. Penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

12. Sabtu, 26 November 2022

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Ranperda tentang APBD ahun 2023.

13. Selasa, 27 Desember 2022

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian laporan Reses Masa Persidangan Pertama tahun 2022/2023
- b. Penutupan Masa Sidang Pertama tahun 2022/2023 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua tahun 2022/2023.

## **Fraksi PDI Perjuangan & PKB**

### **I. Rapat-Rapat Fraksi**

Fraksi PDI Perjuangan & PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fraksi sebanyak 6 (Enam) kali selama masa Persidangan Pertama September & Desember 2022 ini yaitu:

#### **1) Selasa, 6 September 2022**

Rapat Fraksi dengan agenda Penyusunan Pandangan Umum Fraksi Terhadap Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2022.

#### **2) Rabu, 28 September 2022**

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2022.

#### **3) Senin, 31 Oktober 2022**

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pandang Umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBD provinsi Sumatera barat tahun 2023

**4) Selasa, 1 November 2022**

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pandang Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

**5) Jum'at, 25 November 2022**

Rapat fraksi dengan agenda penyusunan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

**6) Rabu, 21 Desember 2022**

Rapat Fraksi Dalam Rangka Penyusunan Pendapat akhir Fraksi-fraksi terhadap atas 4 ranperda yaitu:

1. Tanah Ulayat
2. Tata Kelola Komoditi Unggulan
3. Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana
4. Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

**II. Kegiatan Lain-lain**

Selain mengadakan Rapat Fraksi, anggota Fraksi PDI Perjuangan & PKB juga menghadiri Rapat-rapat yang telah diagendakan oleh Badan Musyawarah yaitu :

**1. Senin, 5 September 2022**

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2022.

**2. Selasa, 6 September 2022**

Rapat Paripurna Dalam Rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun 2022.

**3. Rabu, 7 September 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd tahn 2022.

**4. Jum'at, 30 September 2022**

Rapat Paripurna dalam Rangka Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD tahun 2022.

**5. Sabtu, 1 Oktober 2022**

Rapat Paripurna istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera barat.

**6. Senin, 31 Oktober 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar RAPBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

**7. Selasa, 01 November 2022**

Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

**8. Rabu, 02 November 2022**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota pengantar atas 4 ranperda:

1. Tanah Ulayat

2. Tata Kelola Komoditi Unggulan
3. Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana
4. Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

**9. Kamis, 03 November 2022**

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap ranperda APBD provinsi sumatera barat tahun 2023.

**10. Jum'at, 11 November 2022**

- a. Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian jawaban DPRD terhadap Tanggapan Gubernur terhadap 3 Ranperda yaitu:
  - 1) Tanah Ulayat
  - 2) Tata Kelola Komoditi Unggulan
  - 3) Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana
- b. Penyampaian pandangan umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

**11. Rabu, 16 November 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penetapan propemberda provinsi sumatera barat tahun 2023.
- b. Penyampaian jawaban DPRD terhadap tanggapan gubernur atas 3 ranperda yaitu:
  1. Tanah Ulayat
  2. Tata Kelola Komoditi Unggulan
  3. Perubahan Perda Tentang Penanggulangan Bencana
- c. Penyampaian jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

**12. Sabtu, 26 November 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka penetapan ranperda tentang APBD tahun 2023.

**13. Selasa, 27 Desember 2022**

Rapat Paripurna dalam rangka:

- a. Penyampaian laoran reses masa persidangan pertama tahun 2022/2023
- b. Penutupan masa sidang pertama tahun 2022/2023 dan pembukaan masa persidangan kedua tahun 2022/2023.

## BAB IV HASIL YANG DICAPAI

Dari pelaksanaan agenda kegiatan DPRD terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

### a. Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Perda Provinsi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan perda, selama masa persidangan Pertama tahun 2022, DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan pembahasan terhadap 4 ranperda, yaitu :

1. Ranperda tentang Tanah Ulayat
2. Ranperda usul Inisiatif DPRD tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan.
3. Ranperda tentang Penanggulangan Bencana.
4. Ranperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya sedangkan untuk Ranperda Konversi Bank Nagari, menunggu setelah dilakukan pertemuan/ Rapat Penyamaan persepsi antara Bapemperda, OJK, BI dan Kemendagri yang dilaksanakan rentang waktu tanggal 27 s/d 30 November 2023. Dari Hasil pertemuan tersebut, jika koversi Bank Nagari bisa dilanjutkan berdasarkan penjelasan dari OJK, BI,dan Kemendagri maka pembahasan ranperda dilakukan dengan mekanisme diluar Propemperda.

### b. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Sesuai dengan agenda kegiatan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam permendagri nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD, pada masa persidangan Pertama tahun 2022, sesuai dengan lingkup tugas kewenangannya, DPRD juga telah melakukan pembahasan KUA PPAS Tahun 2023 dan KUPA PPAS Perubahan Tahun 2022, untuk KUA PPAS Tahun 2023 telah disepakati dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 1 Agustus 2022, sedangkan untuk pembahasan KUPA-PPAS Perubahan Tahun 2022 direncanakan akan di tetapkan pada tanggal 1 September 2022.

### c. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ruang lingkup fungsi pengawasan DPRD, mencakup pelaksanaan Perda dan Perkada, Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan lingkup fungsi pengawasan, DPRD melalui komisi-komisi, Bampemperda telah melakukan kegiatan terkait dengan pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur yang menjadi peraturan pelaksana dari Perda tersebut, pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan OPD yang

telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat. Disamping melaksanakan pengawasan tersebut diatas, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi-Komisi dan Badan Anggaran, juga telah membahas RAPBD Perubahan 2022 dan RAPBD Tahun 2023.

**d. Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan yang dihasilkan sebagai berikut :**

NO.	ISI	TANGGAL
1.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 12 / Sb / Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Tugas Tahun 2022-2024	11 Mei 2022
2.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 13/Sb/2022 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Dewan Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Dewan	11 Mei 2022
3.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 14/ Sb / 2022 Tentang Penetapan Usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat	10 Juni 2022
4.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 15/Sb/2022 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Mars Sumatera Barat Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	13 Juni 2022
5.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 16/Sb/2022 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Tahun 2021 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	12 Juli 2022

6.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 17/Sb/2022 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah	19 Juli 2022
7.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 18/Sb/2022 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Untuk Disepakati Menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	11 Agustus 2022
8.	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 19/Sb/2022 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Terhadap Rancangan Prioritas Plafon Dan Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Untuk Disepakati Menjadi Prioritas Plafon Dan Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	11 Agustus 2022

**e. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

NO.	ISI	TANGGAL
1.	Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 9/Kep.Pimp./2022 Tentang Penetapan Pimpinan Dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Masa Tugas Tahun 2022-2024	11 Mei 2022

## BAB V PENUTUP

### Kesimpulan

Dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Barat selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

#### I. Kegiatan Pembentukan Perda

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, Bapemperda dan Biro Hukum telah melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan kinerja pembentukan perda yang telah direncanakan dalam bapemperda sesuai dengan tugas masing masing opd.dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum ini, maka diharapkan kinerja kegiatan pembentukan perda tahun 2023 dapat lebih ditingkatkan dan target kerja Propempeda tahun 2022 dapat tercapai.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk ditetapkan menjadi Perda.

#### II. Kegiatan Rapat-Rapat

- 1) Rapat Paripurna selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 dilaksanakan sebanyak 15 (lima belas) kali.
- 2) Rapat Badan Musyawarah selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 sebanyak 2 (dua) kali.
- 3) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah selama masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 adalah sebanyak 4 (empat) kali.

#### III. Kegiatan Administrasi

1. Surat-surat masuk selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 yang ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD dan DPRD adalah sebanyak 329 (Tiga ratus dua puluh sembilan) surat.
2. Surat Keluar selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 di Sekretariat DPRD adalah sebanyak 551 (Lima ratus lima puluh satu) surat.

#### III. Keputusan DPRD yang dilahirkan selama Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 sebagai berikut:

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 8 (delapan) buah.
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 (satu) buah.

#### IV. Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

##### 1. Kegiatan Komisi-Komisi

Selama masa Persidangan Pertama Tahun 2022

Komisi I

- Rapat Internal Komisi sebanyak 2 (dua) kali

- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 2 (dua) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 8 (delapan) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 6 (enam) kali

#### Komisi II

- Rapat Internal Komisi sebanyak 4 (empat) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 1 (satu) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 6 (enam) kali

#### Komisi III

- Rapat Komisi/Internal Komisi sebanyak 12 (dua belas) kali
- Rapat Kerja dengan Mitra Kerja sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam daerah sebanyak 19 (sembilan belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 3 (tiga) kali

#### Komisi IV

- Rapat Internal Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 3 (tiga) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 10 (sepuluh) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 6 (enam) kali

#### Komisi V

- Rapat Internal Komisi sebanyak 5 (lima) kali
- Rapat Kerja Komisi sebanyak 8 (delapan) kali
- Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebanyak 14 (empat belas) kali
- Kunjungan Kerja Luar Daerah sebanyak 6 (enam) kali

## 2. Kegiatan Bapemperda

Rapat Kerja Bapemperda dengan Pemerintah Daerah membahas Program Bapemperda sebanyak 2 (dua) kali dan kegiatan studi banding/konsultasi/harmonisasi sebanyak 2 (dua) kali

## 3. Kegiatan Badan Musyawarah

Rapat Badan Musyawarah dalam rangka menyusun dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 sebanyak 3 (tiga) kali.

## 4. Kegiatan Badan Kehormatan

Pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023 Badan Kehormatan melaksanakan kegiatan monitoring dan pengawasan internal dengan melakukan rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran anggota DPRD pada rapat-rapat paripurna DPRD dan melaksanakan kegiatan konsultasi/koordinasi sebanyak 1 (satu) kali dan kegiatan Studi Banding sebanyak 2 (dua) kali.

## V. Kegiatan Fraksi

### 1. Rapat Internal Fraksi

- Fraksi Gerindra sebanyak 12 (dua belas) kali
- Fraksi PKS sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi Demokrat sebanyak 7 (tujuh) kali
- Fraksi PAN sebanyak 6 (enam) kali
- Fraksi Golongan Karya sebanyak 6 (enam) kali
- Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 6 (enam) kali
- Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 6 (enam) kali

### 2. Rapat Eksternal Fraksi

- Fraksi Gerindra sebanyak 8 (delapan) kali
- Fraksi PKS sebanyak 13 (tiga belas) kali
- Fraksi Demokrat sebanyak 9 (sembilan) kali
- Fraksi PAN sebanyak 13 (tiga belas) kali
- Fraksi Golkar sebanyak 13 (tiga belas) kali
- Fraksi PPP dan Nasdem sebanyak 13 (tiga belas) kali
- Fraksi PDI-P dan PKB sebanyak 13 (tiga belas) kali

## SARAN

Untuk perbaikan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, disarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program pembentukan peraturan daerah harus disinergikan dengan Penganggaran dalam APBD, agar pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan tidak mengalami kendala dan hambatan dalam segi pendanaan.
- 2) Pemerintah Daerah harus segera menyiapkan Peraturan Gubernur yang diamanatkan dalam peraturan daerah, agar peraturan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dimasyarakat.
- 3) Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan dan hasil pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi dan pokok-pokok pikiran DPRD, perlu dipedomani dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dan OPD terkait serta dianggarkan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan tentang Kegiatan dan Hasil Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan Pertama Tahun 2022/2023, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, aamiin.

PADANG, 27 DESEMBER 2022  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA,



SUPARDI